

ISU-ISU PERDAGANGAN INTERNASIONAL:

dari embargo, perdebatan
open regionalism hingga
transformasi *fair trade*

SUGIARTO PRAMONO



Wahid Hasyim University Press

ISU-ISU PERDAGANGAN INTERNASIONAL:
dari embargo, perdebatan *open regionalism* hingga
transformasi *fair trade*

Penulis : Sugiarto Pramono, SIP., MA.
Diterbitkan oleh : Wahid Hasyim University Press, Jl.
Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan
Semarang, tlp. 0248505680, Fax:
0248505681
Ukuran Buku : 15 cm X 23 cm
Desain Cover : Muhammad Arif Maulana
Cetakan edisi revisi : 10 Januari 2014
ISBN : 978-602-8273-45-9

KATA PENGANTAR EDISI REVISI

KATA PENGANTAR

Buku di tangan pembaca ini merupakan pikiran-pikiran “liar”, tentang isu-isu dalam perdagangan internasional, yang enggan patuh pada standar nilai-nilai 3 tradisi arus utama dalam studi Ekonomi Politik Global/ EPG (merkantilisme, liberalisme dan strukturalisme) dan mengkontruksi nilainya sendiri yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh unsur keadilan dalam praktik perdagangan internasional. Berisi 8 tulisan yang terbagi dalam 3 tema (isu embargo, isu regionalisme dan isu *fair trade*), cukup beragam dari segi kasus dan pendekatan kendati masih berada dalam “satu keranjang” studi EPG.

Sebagian besar gagasan dari tulisan-tulisan tersebut lahir di dalam ruang kelas kuliah Perdagangan Internasional secara persial, terpisah dan tidak dimaksudkan untuk dirangkai menjadi sebuah kesatuan yang utuh sebagai sebuah buku, namun ide untuk menyatukannya dalam sebuah susunan yang lebih sistematis muncul ketika kami—saya dan mahasiswa—merasakan perlunya contoh-contoh kasus sepesifik sebagai pelengkap materi kuliah. Isi buku ini, hemat penulis—sebagai pengampu mata kuliah Perdagangan Internasional—sangat membantu dalam proses belajar mahasiswa, sehingga menerbitkannya akan sangat bermanfaat.

Penulis berhutang budi kepada banyak pihak dalam menyusun buku ini. Tentu mustahil untuk menyebutkan satu persatu nama-nama mereka, hanya sejumlah nama yang dapat penulis sebut karena alasan keterbatasan ruang, mereka adalah: Sudarno dan Daimah, Ayah dan Ibu penulis yang selalu menyebut-nyebut nama penulis di setiap doa yang mereka panjatkan. Sungguh mulia kedudukan mereka di sisi penulis; Rosyidah, Istriku tercinta yang sangat sabar dalam mendampingi penulis. Memuakkan memiliki suami yang selalu

menyibukan diri di depan *lap top* seharian dan enggan membantu pekerjaan istri, namun itu semua justru dibalas dengan kesetiaan dan perhatian penuh darinya.

Kemudian, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Wahid Hasyim, Dr. H. Noor Achmad, MA., yang selalu memberi dorongan dan bimbingan pada penulis; Dekan FISIP UNWAHAS, Andi Purwono, SIP, MA., yang menjadi dosen kebanggaan penulis selama penulis kuliah di FISIP UNWAHAS hingga sekarang ketika penulis sudah mengajar di almamater tercinta; para senior di FISIP UNWAHAS yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi: Bu Ismi, Bu Ana, Pak Agus, Mas Harun, Pak Martin, Pak Adib dan Pak Joko; rekan-rekan seperjuangan: Mas Aji, Mas Adi, Gus Azmi dan Mas Zudi Setiawan, kalian dahsyat. Semuga apapun dan seberapa bantuan kalian terhadap penulis dalam merampungkan naskah buku ini, dibalas oleh Allah *subhanallahu wata'ala* dengan balasan yang berlipat-lipat. Amien.

Semarang, 5 Januari 2014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Edisi Revisi	
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v

BAGIAN PERTAMA ISU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

BAB 1

MEMAHAMI ISU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL	3
Makna isu	3
<i>Isu dalam perdagangan internasional</i>	5
Pola konflik dalam Perdagangan internasional	7
<i>Tradisi Reformis</i>	9
Struktur Buku	11

BAGIAN KE DUA ISU EMBARGO

BAB 2

PERDAGANGAN SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK: EFEKTIVITAS EMBARGO DALAM MENDORONG DEMOKRATISASI DI MYANMAR	17
Pendahuluan	17
Kerangka konseptual	18
<i>Demokrasi dan seting global</i>	18
<i>Embargo</i>	20
<i>Efektifitas embargo</i>	21
Demokratisasi di Myanmar	23
Efektivitas Embargo	24
<i>Konstalisasi kepentingan global</i>	25
<i>Faktor India dan Cina</i>	25
<i>Pengaruh Korea Utara (Korut)</i>	27
Kesimpulan	28

BAB 3

KEPENTINGAN <i>EMERGING MARKET</i> VERSUS HAK ASASI MANUSIA DI MYANMAR	31
Pendahuluan	31
Realisme politik versus HAM	32
HAM di Myanmar	34
Sikap aneh India-Cina	36
Kepentingan India, Cina dan Myanmar	37
Aneka kemungkinan implikasi terhadap HAM	39
Penutup	41

BAB 4

DOMINASI INVESTASI ASING DI INDONESIA: FAKTOR DAN IMPLIKASI.....	43
Pendahuluan	43
Pola investasi asing	43
Pilihan Kebijakan	46
Kebijakan Pemerintah RI	48
Penutup	50

BAGIAN KE TIGA ISU REGIONALISME

BAB 5

MENAKAR KOMUNITAS ASEAN 2015	53
Pendahuluan	53
<i>Konsep Komunitas</i>	54
<i>Komunitas dalam studi Hubungan Internasional</i>	55
Pembahasan	57
<i>Setting Geografis Asia Tenggara</i>	57
<i>Keragaman Etnisitas dan Religiuitas</i>	58
<i>Intensitas Perang di masa lalu</i>	59
<i>Political will para rezim berkuasa</i>	62
Kesimpulan dan preskripsi	64

BAB 6

OPEN REGIONALISME MEMPERCEPAT PERDAGANGAN MULTILATERALISME, BENARKAH?.....	67
Mendefinisikan <i>open regionalism</i>	68
<i>Open regionalism</i> : dialog Regionalisme-Multilateralisme?	71
Implikasi Uni Eropa terhadap integrasi ekonomi global	73
Implikasi terhadap integrasi ekonomi global	74

BAGIAN KE EMPAT ISU *FAIR TRADE*

BAB 7

<i>FAIR TRADE</i> DALAM PETA PERDEBATAN PERSPEKTIF ARUS UTAMA EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL	79
Perspektif arus utama EPI	79
Fair Trade dalam perdebatan perspektif arus utama ..	82
Refleksi	84

BAB 8

TRANSFORMASI <i>FREE TRADE</i> MENUJU <i>FAIR TRADE</i> , MUNGKINKAH?	87
Transformasi paradigma	88
Paradigma <i>fair trade</i>	90
Menuju paradigma <i>fair trade</i>	90
<i>Jalan panjang berliku</i>	91
<i>Langkah paling mungkin</i>	93
Penutup	95

BAB 9

JALAN BERLIKU PERDAGANGAN INDONESIA-CINA	97
Isu ekonomi	97

Masalah pada tingkat negara	98
Level pelaku ekonomi	99
Menghadang arus Cina	100
Glosarium	103
Lampiran	109
Biodata Penulis	113

**BAGIAN PERTAMA
ISU DALAM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

BAB 1

MEMAHAMI ISU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Untuk memberikan kerangka teoritik pada sejumlah tulisan yang akan disajikan dalam buku ini, maka dalam bab pembuka akan dibahas terlebih dahulu dua hal yang penulis anggap relevan: *pertama*, kerangka untuk memahami isu perdagangan internasional; dan *kedua* pola konflik dalam perdagangan internasional. Harapannya dengan memahami dua hal tersebut, pembaca—terutama yang tidak memiliki latar belakang keilmuan Ekonomi Politik Global (EPG)¹—akan lebih terbantu.

Makna isu

Chadwick F. Alger (1980) sebagaimana dikutip oleh Muhtar Mas'od dan Riza Noor Arfani (1992, 36-40) dalam buku berjudul *Isu-Isi Global Masa Kini*, memberikan penjelasan yang cukup memadai untuk memahami isu. Secara sederhana isu muncul sedikitnya karena keberadaan 3 dimensi. *Pertama*, dimensi nilai²; *kedua*, dimensi ancaman terhadap nilai tersebut;

¹ Istilah EPG menggantikan Ekonomi Politik Internasional (EPI) karena dianggap lebih representatif. EPG menggambarkan kemajemukan aktor, sementara EPI terkesan menjadikan negara sebagai aktor utama, bila enggan untuk menyebut satu-satunya, namun demikian dalam buku ini kedua istilah tersebut (EPI dan EPG) digunakan tanpa membedakan substansi.

Lebih jauh, ahli EPG dari UGM, Muhtar Mas'od, mendefinisikan Studi EPI sebagai studi tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara “negara” dengan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat (Mas'od, M., 2008, 4).

² Lebih jauh, secara panjang lebar Muhtar Mas'od dan Riza N. A. Menguraikan konsep nilai Alger. Menurut Alger, nilai memiliki bentangan dimensi yang sangat luas, lebih spesifik ditunjuk 8 nilai dasar yang diperjuangkan umat manusia dan ancaman terhadap nilai tersebut, yaitu: nilai perdamaian internasional terancam oleh tindak kekerasan langsung;

dan *ketiga*, adanya dimensi solusi atau upaya untuk melindungi nilai dari ancaman.

Nilai dipredikatkan kepada sesuatu yang membuat sesuatu tersebut kemudian menjadi penting. Dalam hal ini maka kekayaan, kesehatan, lingkungan, keamanan, hak asasi manusia merupakan nilai. Biasanya nilai tidak nampak ketika belum datang ancaman, namun ketika ancaman telah muncul nilai seringkali baru nampak sangat jelas. Lingkungan tidak pernah bernilai hingga akhirnya muncul ancaman, tunjuk saja misalnya panas global (*global warming*); keamanan semula tidak atau kurang dihiraukan sampai muncul, misalnya, potensi serangan terorisme; demikian pula kesehatan hingga muncul virus flu burung dan seterusnya. Terhadap ancaman itu, kemudian munculah upaya untuk melindungi nilai.

nilai penentuan nasib sendiri terancam oleh sentralisasi wewenang; nilai pembangunan nasional terancam oleh kemiskinan; nilai pemerataan ekonomi internasional terancam oleh kemiskinan dan akumulasi; nilai otonomi dan swadaya nasional terancam oleh kemiskinan, akumulasi dan sentralisasi; nilai kesinambungan ekologis terancam oleh teknologi barat dan akumulasi; nilai kebutuhan dasar manusia terancam oleh kemiskinan, akumulasi, sentralisasi, negara, teknologi barat; dan nilai partisipasi terancam oleh kemiskinan, akumulasi, sentralisasi, negara, teknologi barat, skala besar.

Kemudian 8 nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam 6 tema: 1, nilai "*hidup*" dalam arti bertahan hidup; 2, nilai hidup dalam arti semua orang mampu memenuhi *kebutuhan dasar*, tanpa peduli siapa mereka dan di mana mereka tinggal; 3, nilai *otonomi* dan *swadaya* bagi kolektivitas manusia yang dipilih orang sebagai basis identitas; 4, nilai struktur sosial yang menjamin *kesetaraan* dalam hubungan di antara berbagai kolektivitas manusia itu; 5, nilai *partisipasi* oleh seluruh rakyat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kepentingan mereka, termasuk isu-isu global dan isu-isu politik luar negeri lain; dan ke 6, nilai *keeseimbangan dalam hubungan antar manusia dengan lingkungan alamnya* yang bisa melestarikan lingkungan itu.

Ke enam tema nilai tersebut dapat digeneralisasi lagi dalam tingkat yang lebih tinggi, yaitu: *pertama*, jaminan perlindungan, memuat tujuan untuk melindungi kehidupan manusia dan lingkungan hidup manusia; dan *kedua*, menjamin pemerataan, memuat tujuan untuk memungkinkan semua manusia menikmati sumber daya dunia dan mengembangkan potensi kreatif pribadinya.

Terhadap ancaman terorisme misalnya, Amerika secara unilateral mengeluarkan doktrin *war on terrorism* yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia pada masa presiden Megawati yang mengeluarkan Undang-undang anti teror; terhadap panas global, muncul aksi bersama berupa perundingan-perundingan terkait panas global, seperti protokol Kyoto; terhadap ancaman dari perang nuklir maka muncul pula aksi kolektif berupa *Nuclear Non-proliferation Treaty* (NPT) dan seterusnya.

Isu dalam perdagangan internasional

Dalam konteks perdagangan internasional tak luput isu pun muncul dalam beragam bentuk. Melalui kerangka berfikir isu, sebagaimana diuraikan di atas, isu perdagangan internasional dapat dipahami.

Beberapa contoh yang dapat ditunjuk sebagai isu perdagangan misalnya isu embargo. Embargo sejatinya bisa diposisikan sebagai respon terhadap nilai yang terancam. Nilai dimaksud adalah HAM dan demokrasi. Di Myanmar HAM dan demokrasi merupakan nilai yang sangat mahal terutama disebabkan oleh ancaman Junta militer yang sangat represif.

Terhadap ancaman tersebut maka munculah aksi kolektif dari trio Amerika, PBB dan Uni Eropa untuk memberlakukan sejumlah sanksi kepada Junta. Dengan tujuan agar Junta menghentikan atau setidaknya mengurangi aneka aksi pelanggaran HAM dan Demokrasi.

Dalam konteks embargo tersebut maka terdapat sedikitnya 3 dimensi yang membuat embargo muncul sebagai isu perdagangan, yakni: dimensi nilai berupa HAM dan demokrasi; dimensi ancaman berupa kebijakan represif Junta; dan dimensi upaya melindungi nilai yang berupa embargo terhadap Junta.

Contoh lain adalah isu *fair trade* (perdagangan yang adil). *Fair trade* dalam konteks isu perdagangan internasional

dipahami sebagai gerakan yang merespon ancaman dari *free trade* (pasar bebas) terhadap nilai yang berupa *fairness* (keadilan). Pasar bebas sebagai rezim perdagangan internasional terbukti telah melahirkan banyak ketimpangan. Dari ketimpangan ekonomi, di mana *free trade* menciptakan kelas-kelas sosial yang secara ekonomi timpang. Kelas buruh yang semakin mengembang dalam jumlah dengan kepemilikan modal yang semakin menyusut, namun di sisi yang berseberangan kelas borjuis yang semakin mengecil jumlahnya namun semakin mengembang modal yang mereka miliki.

Free Trade yang berorientasi profit juga memiliki sifat merusak lingkungan yang ekstrem dan mengganggu kesehatan. Ia ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar yang selalu berekspansi ke tempat-tempat yang secara sumber daya alam maupun manusia lebih murah dalam rangka efisiensi, namun bersamaan itu meninggalkan jejak perusakan alam sebagai harga yang harus di bayar. Tunjuk saja pencemaran racun arsenik yang menyebabkan penyakit di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi akibat penambangan produsen emas terbesar di dunia, Newmonth; dan kerusakan alam Papua akibat penambangan freeport. Aneka ancaman terhadap keadilan baik terhadap lingkungan maupun manusia inilah yang kemudian direspon oleh para aktivis *fair trade*.

Termasuk dalam isu perdagangan internasional adalah *Regional Trade Agreement* (RTA) yang dianggap sebagai ancaman bagi perdagangan multilateral alias pasar bebas di tingkat global. Dan respon balik para pendukung pasar bebas melalui aneka tekanan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok negara-negara yang masuk dalam jaringan RTA tertentu. Dengan menggunakan kerangka 3 dimensi untuk memahami isu inilah isu-isu dalam perdagangan internasional dalam buku ini dipahami.

Pola konflik dalam Perdagangan internasional

Manusia adalah makhluk ekonomi, demikian ungkap Aristoteles. Sebagai makhluk ekonomi manusia melakukan aktivitas ekonomi, yakni: produksi, distribusi dan konsumsi. Masih menurut Aristoteles, manusia juga makhluk politik yang segala upayanya selalu ditujukan untuk mengejar kekuasaan. Berpijak dari dua premis tersebut, maka manusia berada dalam situasi kejiwaan yang mendorong dirinya untuk mencapai kekuasaan sebesar-besarnya baik secara ekonomi maupun politik.

Bila kita setuju perilaku manusia demikian, maka akan terbentuk (setidaknya dalam asumsi kita) masyarakat yang berkarakter semua melawan semua (*war of all agains all*) yang akan menjadi seting sosial bagi perilaku individu yang juga berkarakter serupa. Bahkan bila telah dibuat regulasi sekalipun, karena perilaku manusia ingin mendapatkan akses ekonomi maupun politik seluas mungkin maka regulasi sering dijadikan instrumen untuk memenuhi hasratnya itu.

Dalam perjalanan panjang sejarah umat manusia, beragam metode pengelolaan hubungan antar manusia—tak terkecuali hubungan perdagangan—telah dipraktekkan namun demikian pola konflik—dari intensitas yang paling rendah hingga paling tinggi—tetap menjadi cerita hubungan antar manusia sepanjang sejarah.

Bahkan tiga tradisi arus utama dalam studi EPG—merkantilisme³, liberalisme⁴ dan strukturalisme/

³Merkantilisme merupakan periode, perspektif dan strategi perdagangan internasional yang menjadikan surplus perdagangan sebagai orientasi negara. Ia merupakan paradigma tertua dalam studi EPI, para pendukungnya adalah Robert Gilpin (1987, 2001, 2002) dan Strange (1984, 1985). Sejumlah asumsi yang dibangun oleh para ilmuwan pendukung merkantilisme adalah: negara-bangsa merupakan aktor dalam ekonomi politik internasional yang secara rasional memaksimalkan kekayaan; tujuan kegiatan ekonomi adalah maksimalisasi kepentingan nasional; sistem internasional bagi merkantilisme adalah konfliktual dan menguntungkan yang kuat; peran negara adalah primer (kekuasaan politik

radikalisme⁵—selalu menceritakan kisah-kisah konflik. Merkantilisme memposisikan negara-negara saling berhadapan memperebutkan surplus perdagangan. Perdagangan adalah sarana mendapatkan kekayaan dan selama kekayaan dapat dikonfersikan ke dalam keamanan misalnya untuk menciptakan senjata atau membelinya maka perdagangan menjadi berdimensi politik dan sangat konfliktual. Pada konteks ini maka merkantilisme membangun arena ketegangan antar bangsa. Ingat, merkantilisme di Eropa (abad 16-18) mengantarkan dunia menuju dua perang akbar abad 20.

GNP, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial); hubungan politik dan ekonomi menurut merkantilisme adalah politiklah yang menentukan ekonomi, bukan sebaliknya; bagi mereka perubahan ekonomi terjadi karena perubahan distribusi kekuasaan; saran para pemikir merkantilisme adalah negara harus mengendalikan pasar dan melindungi ekonomi domestik dari dominasi asing (Mas'ood, M., 2008).

⁴ Liberalisme hadir sebagai upaya untuk mereduksi konflik antar negara melalui instrumen ekonomi. Caranya adalah dengan menihilkan campur tangan negara dalam ekonomi. Perspektif ini didukung oleh Johnson (1967) dan Cooper (1968). Sejumlah asumsinya: aktor dalam ekonomi politik adalah individu-individu yang berperilaku rasional untuk memaksimalkan perolehan; memaksimalkan kesejahteraan global menjadi tujuan utama; sifat hubungan ekonomi-politik adalah harmoni dan saling menguntungkan; sementara peran negara sekunder sebatas pada menjamin pasar bebas; relasi ekonomi-politik, ekonomi seharusnya menentukan politik; ekonomi internasional seharusnya ekuilibrium-dinamik; saran para pemikirnya: manfaatkan sistem internasional namun jangan intervensi pasar demi efisiensi (Mas'ood, M., 2008).

⁵ Strukturalisme/ radikalisme datang sebagai kritik terhadap liberalisme ekonomi yang mereka anggap menciptakan kesenjangan kelas. Para pendukungnya seperti Szentes (1976) dan Wallerstein (1974, 1984). Adapun asumsi yang dibangun tentang ekonomi internasional adalah: kelas sosial merupakan aktor utama dalam ekonomi internasional; memaksimalkan kepentingan kelas sosial menjadi tujuan perjuangan kelas sosial; sifat dan hubungan dalam sistem ekonomi internasional adalah konfliktual dan menguntungkan si kuat; peran negara primer, memperjuangkan kepentingan kelas (menjamin kepentingan kondisi bagi kelestarian kapitalis); bagi strukturalis ekonomi memang menentukan politik; ekonomi internasional cenderung disequilibrum; sementara preskripsi yang mereka tawarkan adalah: negara lemah hindarkan diri dari sistem kapitalisme internasional (Mas'ood, M., 2008).

Pola konflik juga diciptakan oleh hubungan dagang berbasis liberalisme. Pasar bebas sebagai model perdagangan yang disodorkan liberalisme mengkontruksi kelas-kelas sosial berdasar kepemilikan dan membenturkannya dalam konteks perebutan akses ekonomi. Bangunan masyarakat dalam ekonomi liberal berevolusi menuju pertentangan kelas pemilik modal yang jumlahnya semakin sedikit melawan kelas buruh yang jumlahnya semakin besar namun semakin tidak memiliki modal demikian kontruksi pasar bebas dalam kaca mata strukturalis.

Sementara di sisi lain strukturalisme/ radikalisme sebagai model pembangunan belum—bila enggan untuk mengatakan: tidak—memberikan alternatif jalan keluar yang realistis, setidaknya menurut masyarakat yang telah lama hidup di bawah rezim ekonomi liberal.

Tradisi Reformis⁶

Kendati masing-masing tradisi arus utama dalam studi EPI memiliki basis-basis nilai sebagai standar etika dalam

⁶ Tradisi reformis dalam studi EPI muncul sebagai alternatif bagi tradisi arus utama. Para pendukung tradisi ini percaya dan mengakui sejumlah kelebihan dan kekurangan masing-masing tradisi arus utama. Secara lebih pragmatis para tradisi reformis berupaya mensinergikan berbagai potensi positif dari ketiga tradisi arus utama dan secara bersamaan membuang sisi-sisi negatifnya. Orang-orang seperti: Ul Hag (1976) dan Prebisch (dalam Hirschman, 1971) menjadi inspirator dalam tradisi reformis. Adapun sejumlah asumsi yang dikembangkan dalam tradisi ini adalah: para pelaku dalam ekonomi politik internasional tidak hanya negara, namun juga unit-unit transnasional lain; tujuan utama pengelolaan ekonomi adalah maksimalisasi kesejahteraan global; para reformis dalam EPI mengakui, sistem ekonomi politik internasional sekarang bersifat konfliktual dan merugikan si lemah, namun mereka optimis bahwa situasi tersebut dapat diperbaiki; peran negara primer, memperjuangkan kelompok negara-negara lemah dalam forum diplomasi internasional; ekonomi dan politik saling mempengaruhi; perubahan dapat diarahkan ke formasi struktur baru secara damai; adapun strategi yang ditawarkan para pendukung tradisi ini adalah memanfaatkan organisasi internasional untuk: strategi "*collective self-reliance* dan *collective bargaining*" (Mas'oed, M., 2008).

berprilaku, namun nilai-nilai tersebut masih bersifat kaku dan tidak kompromistis. Mirip “kacamata kuda” yang membuat kuda hanya dapat melihat ke depan saja. Kekakuan cara pandang tiga tradisi arus utama studi EPG itulah yang membuka ruang bagi tumbuhnya tradisi alternatif, yaitu reformis.

Tradisi reformis meminjam analisa kritis untuk membedah aneka permasalahan pembangunan, namun menggunakan perspektif kompilasi untuk mengkontruksi jalan keluar. Berbeda dengan para pemikir dari 3 tradisi arus utama yang melihat aktor sebagai monolit (merkantilis melihat aktor dalam arena ekonomi politik internasional terutama adalah negara; liberalisme melihat aktor adalah individu-individu dengan aneka aktivitas ekonominya; dan strukturalis/ radikal melihat aktor adalah kelas-kelas sosial) tradisi reformis membangun kesadaran bahwa aktor dalam ranah ekonomi politik internasional adalah majemuk. Dari negara, Perusahaan Multi Nasional (PMN), berbagai kelompok kepentingan hingga individu-individu memainkan peran dan berpotensi sangat penting.

Tradisi reformis mengakui kemampuan liberalisme dalam menciptakan nilai tambah, namun juga tidak menutup mata dari kesenjangan yang sering sekali ekstrem sebagai konsekuensinya. Di sisi lain tradisi reformis juga mengakui betapa pentingnya pemerataan ekonomi, namun juga tidak menutup mata dari lambatnya pertumbuhan sebagai akibatnya. Tradisi reformis juga mengakui betapa untuk menjamin kemakmuran, negara harus berdaulat, namun tradisi ini juga tidak mengabaikan potensi-potensi penyalahgunaan monopoli kekuasaan negara oleh penguasa belum lagi konflik yang mungkin terjadi akibat perseteruan dagang antar negara. Ringkasnya tradisi reformis berupaya untuk mensinergikan semua potensi positif dari 3 tradisi arus utama studi EPG dan mengeluarkan semua sisi negatifnya.

Sementara dalam tataran implementasi, tradisi reformis mewujudkan diri dalam salah satunya gerakan *fair trade*⁷ yang secara lebih operasional nampak dalam misalnya *eco-labeling* yang berupaya menyelamatkan lingkungan. Cuti *haid* untuk karyawan perempuan, larangan menggunakan tenaga kerja anak, produksi dengan bahan baku limbah demi kelestarian lingkungan, upaya penjamin keamanan bagi konsumen, pembuatan regulasi untuk menjamin keadilan bagi para pelaku bisnis kecil dan lain sebagainya.

Struktur Buku

Buku di tangan pembaca ini merupakan pikiran-pikiran “liar”, tentang isu-isu dalam perdagangan internasional, yang enggan patuh pada standar nilai-nilai 3 tradisi arus utama dalam studi Ekonomi Politik Global/ EPG (merkantilisme, liberalisme dan strukturalisme) dan mengkontruksi nilainya sendiri yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh unsur keadilan dalam praktik perdagangan internasional. Berisi 8 tulisan yang terbagi dalam 3 tema (isu embargo, isu regionalisme dan isu *fair trade*), cukup beragam dari segi kasus dan pendekatan kendati masih berada dalam “satu keranjang” studi EPG.

Sebagian besar gagasan dari tulisan-tulisan tersebut lahir di dalam ruang kelas kuliah Perdagangan Internasional secara persial, terpisah dan tidak dimaksudkan untuk dirangkai menjadi sebuah kesatuan yang utuh sebagai sebuah buku, namun ide untuk menyatukannya dalam sebuah susunan yang

⁷ Oxfam, secara spesifik, mendefinisikan *fair trade* sebagai suatu gerakan internasional yang mencoba memberikan jaminan bahwa produsen di negara-negara miskin mendapat kontrak-kontrak yang adil (*fair deal*) yang mencakup harga yang pantas bagi produk-produk mereka, kontrak-kontrak pembelian jangka panjang, dukungan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, serta peningkatan produktivitas (dikutip dari website Oxfam [<http://www.maketradefair.org>] bagian “*fair Trade and You*” dalam Hadiwinata, B. S., 2004, 6).

lebih sistematis muncul ketika kami—saya dan mahasiswa—merasakan perlunya contoh-contoh kasus spesifik sebagai pelengkap materi kuliah. Isi buku ini, hemat penulis—sebagai pengampu mata kuliah Perdagangan Internasional—sangat membantu dalam proses belajar mahasiswa, sehingga menerbitkannya akan sangat bermanfaat.

Tulisan dalam buku ini dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu: isu embargo, isu *open regionalism* dan *fair trade*. Bagian bertajuk embargo memuat tiga tulisan, *pertama Perdagangan sebagai Instrumen Politik: efektivitas embargo dalam mendorong demokratisasi di Myanmar*. Demi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) embargo dijadikan instrumen guna melumpuhkan Junta di Myanmar. Harapannya Junta akan lemah dan mengalami delegitimasi politik sehingga menyuburkan gerakan *people power*, namun sayangnya upaya tersebut tidak efektif. Pertumbuhan ekonomi India dan Cina mendorong kedua raksasa Asia itu mencari sumber energi dan perluasan pasar. Dari sudut pandang kepentingan kedua *super power* Asia tersebut Myanmar cukup “seksi” dan membuat keduanya mendekati penguasa Myanmar sehingga membuat embargo tidak efektif.

Disambung dengan tulisan *kedua* yang masih mengangkat kasus HAM di Myanmar, namun kali ini lebih menekankan perspektif kepentingan *Emerging Market* Asia, Cina dan India. Dengan judul: *Kepentingan Emerging Market versus HAM di Myanmar* tulisan ini mengisahkan tentang hubungan India-Cina-Myanmar yang menjadi contoh apik betapa nilai HAM belum—bila berat untuk mengatakan: tidak—menjadi acuan perilaku ketika realisme sudah mengakar sangat kuat dalam sanubari para perilaku politik internasional. HAM justru dianggap sebagai omong kosong dan tidak sebanding manfaatnya dengan pembangunan ekonomi.

Seolah melompat dari tema sebelumnya yang mengkaitkan kepentingan ekonomi dengan HAM, pada narasi

ketiga penulis bernarasi tentang sebab dan akibat dari *Dominasi Investasi Asing di Indonesia*. Argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini adalah: pilihan kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah sejatinya merupakan refleksi dari tarik ulur kepentingan aktor-aktor ekonomi politik. Siapa yang paling kuat dan memiliki akses ke dalam proses produksi kebijakan? Apa preferensi kebijakan yang mereka usung? Serta apa kepentingan mereka? Menjadi acuan yang akan menuntun dan mendorong arah suatu kebijakan ekonomi.

Dalam kasus Indonesia, maka si kuat itu adalah investor asing yang dalam banyak sisi memiliki keselarasan kepentingan dengan rezim penguasa sehingga tidak heran bila aneka kebijakan yang dihasilkan penguasa justru memfasilitasi dan menguntungkan mereka dan di saat yang bersamaan sering sekali mengabaikan kepentingan warga negara.

Memasuki bagian kedua buku dengan tajuk *open regionalism* pembaca akan menemukan 2 tulisan menarik: *pertama* bertajuk *Menakar Komunitas ASEAN 2015*. Melalui studi perbandingan Asia Tenggara dan Eropa sejumlah faktor ditemukan sebagai penyebab kuatnya integrasi di Eropa ketimbang di Asia Tenggara: (1) secara geografi Eropa berbentuk benua, sementara Asia Tenggara separuh wilayahnya berbentuk kepulauan; (2) secara etnis dan agama Eropa relatif lebih homogen dari pada Asia Tenggara yang sangat heterogen; (3) dalam konteks sejarah, perang di Eropa bersifat global sehingga menanamkan efek psikologis yang sangat kuat pada masyarakatnya untuk hidup damai, sementara perang-perang di Asia Tenggara relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan Eropa sehingga efek psikologisnya tidak sekuat di Eropa; dan (4) *political will* penguasa di Eropa nampaknya lebih kuat untuk membangun integrasi regional ketimbang di Asia Tenggara.

Dan tulisan *kedua* berjudul: *Open regionalism mempercepat perdagangan multilateralisme, benarkah?* Di sini penulis menceritakan perdebatan apakah *open regionalism*

merupakan hambatan ataukah jembatan dari Merkantilisme menuju Multilateralisme. Di bagian akhir penulis menyorot kasus Eropa sebagai penghambat Multilateralisme.

Bagian terakhir dari buku ini mengangkat isu *fair trade* yang mengetengahkan 2 tulisan: *pertama* tulisan yang berupaya mendudukkan posisi *fair trade dalam peta perdebatan perspektif arus utama Studi EPI*. Setelah memetakan perspektif utama dalam studi EPI yang secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 4 madzhab: merkantilisme, liberalisme, strukturalisme dan reformisme, temuan penelitian *mini* ini menunjukkan bahwa *fair trade* dapat dikategorikan ke dalam madzhab reformisme.

Dan tulisan *kedua* muncul dengan pertanyaan penting terkait *fair trade: Transformasi free trade menuju fair trade, mungkinkah?* Dengan meminjam konsep paradigma Thomas Khun penulis menjelaskan bagaimana sebuah paradigma bangun dan runtuh secara bergantian. *Free trade* sebagai paradigma tergantikan oleh *fair trade* mungkin saja terjadi dengan sejumlah syarat nampaknya *fair trade* sudah memenuhi sebagian syarat tersebut, namun masih ada tugas berat yang menanti.

Selebihnya silahkan pembaca menikmati suguhan gagasan-gagasan segar dalam buku ini. Ibarat sebuah album yang terdiri dari beberapa lagu maka pembaca bisa mulai mendengarkannya urut dari depan ke belakang atau langsung melompat ketengah atau bahkan memulali dari belakang menuju ke depan. Selamat membaca.

Referensi

- Mas'ood, M. dan Riza N. A. (1992). *Isu-Isi Global Masa Kini*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM
- Mas'ood, M. (2008). *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

“fair Trade and You” dalam <http://www.maketradefair.org>
dalam Hadiwinata, B. S. (2004). *Fair Trade: Gerakan
Perdagangan Alternatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Oxfam dan Universitas Katlik Pahrayangan.

BAGIAN KE DUA ISU EMBARGO

BAB 2

PERDAGANGAN SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK: EFEKTIVITAS EMBARGO DALAM MENDORONG DEMOKRATISASI DI MYANMAR

Pendahuluan

Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa proses demokrasi di suatu negara tidak dapat dilepaskan dari konteks internasional. Kendati harus diakui betapa aneka faktor domestik memainkan peran penting dalam dinamika demokrasi dalam suatu negara, namun bukan berarti setting internasional tidak berpengaruh. Pola interdependensi dalam ekonomi politik global kontemporer membuka kemungkinan yang sangat lebar bagi proses demokrasi di suatu negara memiliki kaitan yang sangat erat dengan konteks eksternal.

Pesimisme masyarakat dunia terhadap perkembangan demokrasi di Myanmar nampak dari aneka respon yang ditujukan terhadap hasil pemilu 7 November 2010. Presiden ASEAN *Inter-Parliamentary Myanmar Caucus* (AIPMC) Eva Kusuma Sundari mengatakan: "Hasil pemilu Myanmar harus ditolak. Alasannya, pemilu yang digelar Junta itu tidak memiliki unsur sebagai pemilu yang bebas dan bersih" (tempointeraktif.com: Indonesia Diminta Tolak Hasil Pemilu Myanmar). Bahkan Komite Hak Asasi Manusia PBB juga mengutuk pemilu yang baru digelar tersebut dengan mengatakan bahwa hasil pemilu tersebut adalah kecurangan (international.okezone.com: PBB Kutuk Hasil Pemilu Myanmar). Apa yang dikhawatirkan khalayak internasional perihal pemilu di Myanmar akhirnya terjadi. Hasil pemilu menunjukkan lebih dari 80 persen suara diraih oleh partai yang didukung oleh Junta, yakni *Union Solidarity and Development Party* (USDP) dan *National Unity Party* (NUP), alhasil Junta tetap memegang kendali kekuasaan di Myanmar.

Secara spesifik tulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi pengaruh konteks internasional terhadap dinamika demokratisasi di Myanmar. Sekali lagi, penulis tentu tidak menafikan seting domestik dalam turut membentuk dan mempengaruhi dinamika demokrasi Myanmar, namun hal itu tidak membuat faktor eksternal kehilangan makna. Dimensi ekonomi-politik baik di tingkat domestik maupun internasional telah berjaln berkelindan sembari mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika demokrasi di Myanmar.

Kemenangan Junta dalam pemilu menyuguhkan kepada kita: tidak efektifnya embargo AS, UE dan PBB terhadap Myanmar untuk menciptakan demokrasi di negeri para Jenderal itu. Kegagalan tiga kekuatan global tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, secara lebih spesifik tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: *mengapa embargo AS, UE dan PBB terhadap Myanmar tidak efektif?*

Kerangka konseptual

Untuk menganalisa sejauh mana pengaruh embargo ekonomi AS, UE dan PBB terhadap dinamika demokrasi di Myanmar, penulis menggunakan sedikitnya dua kerangka teoritik. *Pertama*, pikiran Ricard Falk, O'Donnell, Schmitter dan Wesolowski yang meyakini konteks internasional memiliki pengaruh terhadap dinamika demokratisasi di tingkat domestik dan *kedua* konsepsi mengenai embargo sebagai instrumen kebijakan global.

Demokrasi dan seting global

Kendati faktor domestik memainkan peran kunci dalam dinamika demokrasi suatu negara, namun sulit bagi kita menutup mata terhadap pengaruh seting global khususnya dimensi ekonomi-politik terhadap proses demokrasi di suatu negara. Ricard Falk merupakan salah satu ilmuwan yang meyakini adanya pengaruh seting eksternal itu. Falk menawarkan dua

pendekatan untuk kaitan-kaitan tersebut, yaitu: pendekatan sistemik dan pendekatan aktor (Mas'oeed, M., 2003, 24).

Dalam pendekatan sistemik, Falk menunjukkan terdapat korelasi antara struktur ekonomi-politik baik di tingkat global maupun regional terhadap proses demokrasi suatu negara. Interdependensi ekonomi semakin memperkecil kemungkinan suatu negara dapat menentukan arah kebijakannya secara independen. Dinamika demokrasi di Myanmar menjadi contoh *apik* dalam hal ini betapa stuktur sistem global telah mempengaruhinya. Interdependensi atau saling ketergantungan antar berbagai aktor semakin memperkecil kemampuan suatu negara untuk bertindak secara independen. Setiap kebijakan yang dibuat selalu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh (f)aktor lain.

Pendekatan *kedua* menekankan pada peran aktor global ketimbang struktur. Baik aktor negara (*state*) maupun non negara (*non-state*) seperti individu-individu penting, perusahaan-perusahaan multinasional (*multi national cooperations*) sebut saja *Free Port* dan *Exxon Mobil* hingga berbagai kelompok kepentingan yang bergerak dalam sektor lingkungan, hak asasi manusia dan demokrasi memainkan peran penting dalam turut mempengaruhi dinamika demokrasi di tingkat domestik.

Contoh paling mudah ditunjuk adalah ketika pada tahun 1978 kebijakan AS terhadap Iran dianggap sejalan dengan kebijakan Shah Reza Pahlevi pemimpin anti demokrasi. Faktor ekonomi politik membuat hubungan Adi Daya dengan rezim penguasa kala itu berlangsung harmonis. Implikasi paling dekat dari kemesraan hubungan tersebut adalah dirampasnya kebebasan politik warga Iran oleh kediktatoran Pahlevi atas restu AS.

Permisalan lain, invasi AS ke Irak tahun 2003 dengan alasan menumbangkan rezim otoriter di bawah pimpinan Sadam justru digantikan oleh "rezim boneka" yang kendati didesain

dengan format demokrasi namun justru menciptakan konflik berkepanjangan, dan kepentingan ekonomi-politik AS diyakini ada di balik itu.

Ilmuan lain yang memberikan perhatian pada faktor eksternal adalah O'Donnell, Schmitter dan Wesolowski. Wesolowski, menulis:

Benarkah begitu? Seorang ilmuan Polandia yang menulis tentang proses demokratisasi di Eropa Timur berpendapat sebaliknya. Dalam tulisan itu Ia menyatakan bahwa dunia masa kini terbagi dalam 'pusat' dan 'pingiran'. Proses yang berlangsung di Polandia dewasa ini tidak bisa dianalisis secara terpisah dari proses-proses di Uni Soviet.....sudah sampai saatnya ketika Uni Soviet menjadi pendukung gagasan pluralisme politik.....jika kita bisa menerima proposisi bahwa perubahan pusat itu mempengaruhi pinggiran, harapan akan mundurnya otoriterisme di Blok Timur akan diperkuat.....revolusi anti Komunis di Cekoslovakia dan Jerman Timur menciptakan suatu konteks internasional yang menguntungkan bagi perubahan lebih lanjut di Polandia. Begitu pula perkembangan politik di Uni Soviet (dikutip oleh Mas'ood, M., 2003, 203).

Selanjutnya, pengaruh seting global terhadap dinamika demokrasi di Myanmar sedikitnya mewujud dalam dua bentuk: (1) embargo yang dilakukan PBB, AS dan UE terhadap Junta; dan (2) konstalasi kepentingan India-Cina dan Korut, sehingga untuk membantu memahami bagaimana pola hubungan tersebut maka berikut akan dipaparkan konsep embargo.

Embargo

Dalam konteks ekonomi-politik global yang semakin kait terkait, ekonomi menjadi salah satu instrumen global yang dipandang memiliki relevansi terutama di era paska perang dingin. Instrumen militer yang acapkali berimplikasi destruktif bahkan hingga tingkat yang tidak dapat dikendalikan dianggap tidak rasional bila digunakan. Instrumen ekonomi diyakini jauh lebih beradab ketimbang instrumen perang. Semakin tereduksinya derajat relevansi militer dalam sistem global yang

berpola *complex interdependence* berbanding terbalik dengan semakin menguatnya kegunaan ekonomi sebagai instrumen dalam hubungan global.

Secara lebih operasional ekonomi sebagai instrumen dapat berupa *rewards* seperti *capital grand, soft loan, investment guarantes* dan *punishment* seperti *Freezing Bank Assets, Import Boycotts, Increasing Tarrif, Embargoes* dan sebagainya (Purwono, A., 2008). Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo adalah pelarangan peniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasiannya dan menyebabkan negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit (Purwono, A: 2008). Embargo biasanya digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Salah satu contoh embargo adalah yang pernah dilakukan Amerika terhadap Irak sebelum pada akhirnya negara tersebut diinvasi pada tahun 2003.

Embargo ditujukan untuk mengendalikan dan mempengaruhi tingkah laku dan pikiran negara lain. Salah satu yang perlu digaris bawahi adalah bahwa embargo nyaris tidak dapat digunakan oleh negara yang tidak memiliki basis ekonomi yang kuat, sehingga sejumlah syarat harus dimiliki, yaitu: (1) *financial power*; (2) *political will* (kemauan untuk menggunakan kekuatan ekonomi); (3) *skill in aplications* yakni ketrampilan dalam menggunakannya; serta (4) reputasi dalam menggunakannya (Purwono, A., 2008).

Efektifitas embargo

Seberapa efektifkah embargo? Terhadap pertanyaan ini, maka ada sedikitnya tujuh indikator yang dapat dijadikan tolak ukur: (1) *the stake was hight* (resiko tinggi); (2) sanksi akan gagal ketika ada pihak lain yang mensuplai; (3) sanksi akan memicu munculnya patriotik dari negara sasaran; (4) sanksi

butuh waktu untuk dimobilisasi; (5) sanksi berpotensi memproduksi problem administratif dan hukum dengan kompleksitas tinggi sehingga membutuhkan energi ekstra dari birokrasi; (6) sanksi berarti reduksi atau akhir dari bantuan luar negeri sehingga sanksi akan sulit diterapkan jika ada kesamaan kepentingan sebelumnya antara negara donor dan target; dan (7) berbeda dengan serangan militer, sanksi memiliki dampak merusak yang tidak diskriminatif artinya mengenai semua. Pada akhirnya sanksi ekonomi akan efektif jika dibarengi dengan *force*, propaganda dan diplomasi terutama jika targetnya negara lemah (Purwono, A., 2008).

Selanjutnya terdapat banyak cara untuk mengukur tingkat efektifitas suatu embargo, salah satunya dan yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan membandingkan antara motif embargo dengan hasil yang dicapai. Bila tujuan embargo lazimnya untuk mengendalikan perilaku suatu negara, maka semakin patuh suatu negara terhadap tuntutan embargo, semakin efektif embargo tersebut namun sebaliknya semakin jauh perilaku suatu negara dari perilaku yang diharapkan maka semakin tidak efektif suatu embargo.

Dalam kasus embargo terhadap Junta di Myanmar, bisa disarikan secara implisit bahwa tujuan embargo yang dilakukan tiga kekuatan kunci dunia itu adalah untuk memperlemah basis ekonomi penguasa Myanmar, sehingga berimplikasi pada delegitimasi penguasa. Dengan menggunakan tolak ukur efektifitas berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka embargo yang dilakukan AS, UE dan PBB terhadap Myanmar sangat jauh panggang dari api, alih-alih berimplikasi pada delegitimasi kekuasaan Junta, pemerintah berkuasa justru semakin terlegitimasi oleh hasil pemilu November 2010 lalu, bahkan ketidakefektifan embargo semakin tegas dengan pengembangan proyek nuklir oleh Junta.

Bagaimana negara bertahan dari sanksi? Rekaman atas perilaku negara ketika mereka dikenai sanksi ekonomi adalah:

(1) *stockpilling*/ menimbun; (2) *diversification of trade (market and sources of supply)*; (3) *domestic substitution*; (4) *exchange control*; (5) *rationing*; (6) *concealment* (seperti pada jumlah minyak yang dijual, atau statistik perdagangan internasional); (7) *transport diversification*; (8) *sanctions busting (clandestine trading)*; dan *counter sanction (commercial/ financial retaliation)* (Purwono, A., 2008). Dengan salah satu atau kombinasi dari serangkaian strategi itu suatu negara bertahan dari embargo.

Demokratisasi di Myanmar

Pemerintahan yang dibangun Burma paska kemerdekaan 1948 adalah pemerintahan demokrasi. Di bawah pemerintah sipil U Nu, aneka kebijakan ditujukan untuk merespon berbagai tantangan Burma paska kemerdekaan. Masalah-masalah seperti ketikstabilan politik, ekonomi, pembelotan serta pemberontakan mendominasi isu nasional kala itu. Implementasi serangkaian kebijakan pembangunan yang berbasis pada prinsip *Pydawtha* (negara yang makmur) pada akhirnya gagal menjawab berbagai persoalan sosial politik dan ekonomi kala itu.

Klimaks perjalanan sejarah mulai muncul menjelang pemilu 1960. Jendral Ne Win diberi tugas untuk menjaga stabilitas politik domestik dan menyelenggarakan pemilu. U Nu pun memenangkan pemilu dan kembali ke tampuk kekuasaan. Buruknya situasi sosial, politik dan ekonomi nasional memposisikan U Nu menjadi tumpuan masyarakat Burma. Bangsa Burma menaruh harapan yang besar pada pemerintahan baru tersebut.

Pihak militer memberi waktu dua tahun kepada pemerintah untuk memulihkan kestabilan ekonomi politik domestik, sayangnya pemerintah gagal. Kemudian militer dengan dukungan warga negara pro militer mengambil alih kekuasaan, dan kudeta terjadi pada tanggal 2 Maret 1962.

Tumbangnya rezim U Nu, merupakan awal pemerintah militer di Myanmar. Pemerintah paska U Nu hanya mengakui satu partai yaitu *Burmese Socialist Program Party* (BSPP) yang dibentuknya sendiri. BSPP merupakan partai yang dirancang untuk mendorong program sosialis pemerintah yang didominasi militer. Partai tersebut didirikan tahun 62 dan disahkan 2 tahun kemudian. Pada tahun 1972 militer menjadi pilar pokok partai. Intervensi militer terulang pada pemilu 1990. Hasil pemilu 27 Mei 1990 yang ternyata dimenangkan oleh *National League for Democracy* (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi dianulir oleh Jenderal Saw Maung. Lebih jauh Aung san Suu Kyi yang dianggap sebagai “duri dalam daging” bagi Junta pun dijadikan tahanan rumah.

Pemilu yang sarat dengan politik kekuasaan Junta kembali digelar 7 November 2010 lalu dan banyak pihak yang meyakini pesta rakyat itu hanya menjadi basis legitimasi kekuasaan rezim militer. Sandera terhadap demokrasi di Myanmar membuat aktor-aktor global seperti PBB, AS dan negara-negara UE geram.

Efektivitas Embargo

Kali pertama embargo terhadap Myanmar diberlakukan oleh UE pada tahun 1990 an, kemudian dikonfirmasi pada 29 Juli 1991 oleh *the General Affairs Council* dan *Common Position* 1996/635/CFSP. Embargo mencakup *weapons and ammunition, weapon and non-weapon platforms and ancillary equipment*. Pada perkembangannya embargo diikuti oleh PBB dan AS pada tahun 1997. Motif embargo secara prinsipil yaitu memperlemah legitimasi kekuasaan Junta di tingkat domestik. Junta menolak tekanan masyarakat internasional untuk membebaskan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Syu Kyi, yang menjadi tahanan rumah pemerintah militer.

Suu Kyi dianggap sebagai “duri dalam daging” bagi pemerintah berkuasa. Junta sengaja memutus komunikasi

antara beliau dengan para pendukungnya karena kekhawatiran akan bangkitnya gerakan anti pemerintah yang sejatinya sudah mengakar cukup lama, setidaknya sejak Partai Suu Kyi dianulir Jenderal Saw Maung setelah menang telak dalam pemilu 1990.

Kebijakan rezim Junta terhadap gerakan demokrasi di Myanmar sangat represif. Bahkan kendati akhirnya Suu Kyi dibebaskan menjelang pemilu 2010, partai di bawah pimpinan Suu Kyi di masukkan ke dalam daftar hitam partai yang dilarang ikut pemilu. Sehingga pada akhirnya pemilu dimenangkan oleh partai dukungan pemerintah, USDP dan NUP yang menang telak. Kemenangan telak partai kanan di Myanmar menjadi indikator bahwa sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Junta tidak efektif. Karena alih-alih memperlemah rezim berkuasa, sanksi justru menyulitkan perekonomian rakyat, sehingga berimplikasi pada terbukanya peluang bagi partai penguasa untuk melakukan *many politics*.

Konstalasi kepentingan global

Hemat penulis sedikitnya terdapat dua faktor di tingkat global yang berpengaruh terhadap gagalnya sanksi ekonomi terhadap penguasa Myanmar, yaitu: (1) simbiosis mutualisme Junta dengan Cina dan India; dan (2) aliansi dengan Korea Utara.

Faktor India dan Cina

Ekonom Goldman Sachs, bank investasi terbesar AS pada tahun 2001 memprediksi India dan Cina— disamping Brasil dan Rusia yang kemudian dikenal BRIC—akan menjadi empat ekonomi terbesar di dunia pada 2050, atau raksasa-raksasa baru ekonomi dunia (Media Indonesia: RI berpotensi masuk kelompok raksasa baru, 17). Sementara itu menurut catatan *World Economic Outlook*, kontribusi Cina terhadap PDB global tahun 2007 mencapai 10,8%, hanya kalah dari AS (21,4%) dan jauh di atas Jepang yang hanya mencapai 6,6%, India (4,6%), Jerman (4,3%), Inggris (3,3%), Rusia (3,2%), dan Prancis

(3,2%), sementara total PDB Negara Sedang Berkembang (NSB) adalah 41% (Winarno, B., 2010, 143). Lebih jauh, Bank Dunia memprediksi pada tahun 2020 *share* Cina pada perdagangan akan naik 3 kali lipat dari sekarang (2004), mencapai 10% (Wibowo, I., 2004, 64).

Di sisi lain India menunjukkan ambisi yang luar biasa dalam percepatan pertumbuhan ekonominya. Lihat saja misalnya pada tahun 2003 pertumbuhan rata-rata negeri itu mencapai 8,5%, tahun 2004 (7%), 2005 (9.0%) dan 2006 (9,2%) (Panagaria, A., 2008, 5). Pada saat yang bersamaan India hanya memiliki produksi minyak mentah 21,1 juta ton pada tahun 2004 (bandingkan dengan misalnya Indonesia yang memproduksi sejuta lebih barel perhari) (Suhanda, I., 2007, xxi). Padahal komposisi sektoral perekonomian India didominasi sektor Industri hingga 27% (2004-5) dari pada pertanian yang hanya 21% (Panagaria, A., 2008, 13), artinya kebutuhan akan energi sangat tinggi. Hal serupa yang juga terjadi pada Cina.

Dengan percepatan pertumbuhan yang mengagetkan baik Cina maupun India tak ayal membutuhkan sumber energi baru untuk menggerakkan perekonomiannya. Sementara Myanmar yang secara geografis berbatasan dengan kedua negara tersebut merupakan produsen energi tertua dunia. Burma memproduksi 18.000 barel minyak bumi perhari dimana 90% merupakan gas alam (birmanie.total.com: *Oil and gas in Myanmar*) yang sangat dibutuhkan sebagai penggerak roda perekonomian Indi dan Cina.

Kepentingan nasional kedua negara kuat Asia itulah yang kemudian menuntut keduanya untuk menjalin hubungan harmonis dengan Junta, sehingga tidak mengherankan bila Cina dan India berlomba-lomba merebut hati Junta agar mau melakukan aneka kerjasama terutama dalam bidang pertambangan gas dan minyak bumi. Sehingga tidak mengherankan bila berbagai paket bantuan finansial maupun pembangunan infrastrukturpun mengalir ke negeri Junta.

Hubungan ekonomi Myanmar dengan India dan Cina memperkokoh basis ekonomi Junta, sehingga dampak embargo yang dilakukan AS, UE dan PBB nyaris tidak dirasakan oleh pemerintah militer itu. Justru yang menarik, alih-alih mengeroposkan basis ekonomi Junta sanksi ekonomi justru membawa multi efek yang luar biasa memilukan bagi warga Burma. Beberapa fakta yang dapat ditunjuk, sebagaimana dipublikasikan oleh Burma Campaign UK pada bulan Maret tahun 2007, adalah lebih dari 60% penduduk Burma hidup dalam kemiskinan serta tingginya kematian bayi, bahkan dengan rasio satu banding sepuluh bayi meninggal sebelum usia 5 tahun (The Burma Campaign UK, 2007, 1). Lebih jauh lagi, kesulitan ekonomi warga negara juga berpotensi membuka kemungkinan terjadinya *many politics* partai kanan dalam pemilu November lalu. Asumsi ini tidak berlebihan, bukti paling mudah ditunjuk adalah kemenangan telak 80% kedua partai dukungan Junta dalam pemilu.

Pengaruh Korea Utara (Korut)

Permusuhan AS-Korut meningkat terutama setelah Korut meningkatkan kemampuan senjata nuklirnya. Pola *dilemma security* terjadi dalam hubungan kedua negara. Logika "musuhnya musuh adalah teman" nampaknya menjadi latar belakang pemikiran para pemimpin Korut untuk menjalin kerjasama dengan Myanmar. Bentuk kerjasama paling dianggap menakutkan dari dua negara itu bagi AS adalah kerjasama militer.

Diyakini, nuklir Myanmar berasal dari Korut, bahkan Robert Kelley (Direktur IAEA) sebagaimana dikutip oleh Jerome E. Wirawan dalam tulisan "Myanmar dan Ambisi Nuklirnya" yang dipublikasikan oleh harian *Media Indonesia* (Selasa 28 Desember 2010), menegaskan bahwa yang dilakukan oleh Junta adalah mengembangkan senjata nuklir karena mereka melakukannya secara rahasia dengan proses kimia yang

mencurigakan. Gelagat Junta yang semakin tidak kooperatif menjadi indikasi yang sangat kuat betapa embargo tidak hanya tidak produktif bahkan kontra produktif.

Kesimpulan

Dalam kasus demokratisasi di Myanmar konteks internasional memiliki peran penting. Embargo terhadap Myanmar terbukti kontra produktif. Alih-alih melemahkan basis ekonomi Junta—sehingga diharapkan akan melahirkan gejolak politik dan deligitimasi terhadap kekuasaannya—embargo justru berimplikasi pada kesulitan ekonomi rakyat Burma yang bererarti membuka kemungkinan untuk *many politics* oleh paratai-partai berhaluan kanan. Asumsi ini menjadi meyakinkan dengan kemenangan telak partai dukungan Junta yang mencapai 80%, padahal Junta merupakan pemerintah militer represif dengan pelanggaran HAM berat.

Celakanya situasi itu dibarengi dengan konspirasi kepentingan ekonomi-politik antara Cina, India dan Korea Utara dengan Junta. Di satu sisi Cina dan India sebagai aktor ekonomi kuat dunia melihat potensi gas yang terkandung di Myanmar sebagai potensi energi masa depan mereka, sementara di sisi yang berbeda Junta di Myanmar melihat ambisi energi Cina dan India sebagai peluang membangun kekuatan ekonomi Junta yang berada dalam kesulitan akibat embargo.

Sementara dalam isu yang berbeda, permusuhan Korut dengan AS, memberi inisiatif bagi negeri itu untuk berkoalisi dengan Myanmar. Bentuk paling kasat mata adalah transfer teknologi nuklir dari Korut ke Myanmar. Konstalasi kepentingan Junta dengan negara-negara tersebut telah meruntuhkan sekenario trio AS, PBB dan UE untuk mendesain masa depan demokrasi di negeri para Jenderal itu.

Keterlibatan Cina, India dan Korut dalam kegagalan embargo menjadi indikasi (1) betapa distribusi kekuatan ekonomi-politik global telah terpolarisasi menjadi lebih

kompleks. AS, UE dan PBB bukan lagi menjadi aktor-aktor global yang tanpa tanding, kebangkitan kedua raksasa Asia nampaknya melemahkan—bila bukan mengakhiri—signifikansi kekuatan ekonomi-politik AS, UE dan PBB; (2) pola perubahan kekuatan ekonomi-politik beralih dari yang sebelumnya berada di barat ke timur, dan (3) perubahan pola tersebut nampaknya akan membuka kemungkinan perubahan tingkah laku negara-negara dunia ketiga yang nampak dari, salah satunya, perilaku Burma.

Referensi

- Mas'ood, Mohtar (2003). *NEGARA, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Prlajar.
- Purwono, Andi (2008). *Analisa Politik Luar Negeri* (diktat kuliah). Semarang: Ilmu Hub. Inter. FISIPOL. UNWAHAS.
- Panagaria, Arvin (2008). *India The Emerging Giant*. New York: OXFORD.
- Suhanda, Irwan (2007). *India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia: calon pemain utama dunia di era globalisasi*. Jakarta: Kompas.
- Winarno, Budi (2010). *Melawan Gurita Neo Liberalisme*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wibowo, I (2004). *Belajar Dari Cina: bagaimana Cina merebut peluang dalam era globalisasi*. Jakarta: Kompas.
- Burma Campaign UK. (2007). "Burma-India Relations: A betrayal of democracy and human right" (A summary of the key issues relating to Burma and India).
- "Indonesia Diminta Tolak Hasil Pemilu Myanmar" *Tempo Interaktif*, Senin 15 November 2010-14:41 wib., diakses dari:
<http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/11/15/brk,20101115-291979,id.html>, selasa 21 des 2010, pukul 10:30 WIB.

“PBB Kutuk Hasil Pemilu Myanmar” Jum'at, 19 November 2010 -
11:08 wib diakses dari:
<http://international.okezone.com/read/2010/11/19/18/394786/pbb-kutuk-hasil-pemilu-myanmar>, Selasa 21
Des 2010, pukul 10:30 WIB.

Media Indonesia. Selasa 28 Desember 2010.

BAB 3

KEPENTINGAN *EMERGING MARKET* VERSUS HAK ASASI MANUSIA DI MYANMAR

Pendahuluan

Cerita ini dimulai sejak India dan Cina menyadari dirinya menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang fantastis dan melihat Myanmar yang sebelumnya bukan apa-apa menjadi sangat penting karena kandungan gas alamnya. Saat itu kedua negara pemain baru ekonomi Asia, India dan Cina, yang juga tetangga perbatasan Myanmar, mulai melirik dan secara pelan namun pasti mendekati negeri Junta tersebut. Indikator paling mudah ditunjuk selain meningkatnya angka perdagangan kedua negara dengan Myanmar, saling kunjung pejabat dan aneka bantuan infrastruktur ke Myanmar adalah keberadaan perusahaan gas dan minyak Cina seperti *China National Offshore Oil Corporation* dan *China National Petrochemical Corporation* dan perusahaan gas dan minyak asal India seperti *ONGC Videsh Ltd.*, *GAIL* dan *Essar Oil Ltd* (birmanie.total.com: Oil and Gas in Myanmar).

Ada dua poin penting yang perlu digaris bawahi: *pertama*, terjadi rivalitas antara India dan Cina dalam memperebutkan sumber gas dan minyak di Myanmar; dan *kedua*, celakanya peristiwa mendekatnya India dan Cina ke Myanmar bersamaan dengan lilitan berbagai pelanggaran HAM oleh Junta hingga pada tahap mengundang tekanan bertubi-tubi dari masyarakat internasional terhadap rezim berkuasa di Myanmar, bahkan karena alasan itu pula Amerika, negara-negara Eropa dan PBB mengembargo Myanmar.

Tulisan ini berfokus pada menjawab dua pertanyaan: (1) mengapa India dan Cina mendekati Myanmar? Dan (2) apa aneka kemungkinan implikasi merapatnya India dan Cina ke Myanmar terhadap penegakan nilai-nilai HAM di Myanmar?

Realisme politik versus HAM

Ada, menurut penulis, dua konsep yang dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku India, Cina dan Myanmar serta perdebatan HAM yang mengitarinya, yaitu: realisme politik dan HAM. Realisme politik merupakan perspektif paling tua dalam studi Hubungan Internasional (HI). Kendati terdapat aneka kritik ditujukan terhadapnya namun tidak sedikit fakta empirik hubungan internasional kontemporer yang justru semakin melegitimasi keyakinan para pendukung perspektif ini.

Secara ringkas realisme politik dalam studi HI dapat dijelaskan dalam tiga argumentasi. *Pertama*, realitas internasional sejatinya merupakan arena pertarungan negara-negara dengan aneka kepentingan nasional yang melatar belakangnya; *dua*, terdapat beragam cara yang digunakan negara dalam memperjuangkan kepentingannya di tingkat internasional diantaranya adalah menggunakan instrumen militer, ekonomi dan diplomasi; dan *ketiga*, keyakinan bahwa idealitas hubungan internasional adalah omong kosong. Berbagai isu moral seperti HAM, lingkungan, demokrasi serta aneka isu lainnya yang berbasis moralitas tidak lebih dari siasat negara untuk menaklukkan negara lain.

Secara lebih riid, Keggle dan Witkopf sebagaimana dikutip oleh Aleksius Jemadu (2008), menguraikan sedikitnya 10 asumsi dasar perspektif ini. (1) manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan etika dan selalu terdorong untuk mengambil keuntungan dalam berhubungan dengan orang lain; (2) hasrat manusia untuk berkuasa dan mendominasi orang lain merupakan niat buruk yang paling menonjol dan berbahaya dalam hubungan dengan sesamanya; (3) peluang untuk menghilangkan hasrat untuk meraih kekuasaan hanyalah sebuah aspirasi yang utopis; (4) esensi dari politik internasional adalah pertarungan untuk meraih kekuasaan di mana prinsip "*war of all agains all*" berlaku; (5) kewajiban utama negara yang melampaui semua tujuan nasional

lainnya adalah memperjuangkan kepentingan nasional dan meraih kekuasaan untuk mewujudkannya; (6) sistem internasional yang anarkis memaksa negara untuk meningkatkan kapabilitas militernya guna menangkal serangan dari musuh potensial dan menjalankan pengaruhnya atas negara lain; (7) kekuatan militer lebih penting daripada ekonomi demi tercapainya keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi hanyalah sarana untuk mencapai dan memperluas kekuasaan dan prestise negara; (8) sekutu dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mempertahankan diri tetapi kesetiaan dan keandalannya tidak bisa dipastikan sebelumnya; (9) negara tidak boleh mengandalkan organisasi internasional atau hukum internasional untuk menjamin keamanan nasionalnya. Selain itu negara juga harus menolak setiap upaya pengaturan perilaku internasional melalui mekanisme pemerintahan global; dan (10) karena semua negara berusaha untuk meningkatkan kekuatannya maka stabilitas hanya bisa dicapai melalui keseimbangan kekuatan (*balance of power*) yang diperlancar oleh pembentukan dan pembubaran aliansi-aliansi yang saling bertentangan (Jemadu, A., 2008, 21-2).

Atau dengan kata lain Keggley dan Witkopf hendak mengatakan bahwa sejatinya perilaku negara—negara di kancah internasional tidak ubahnya dengan perilaku orang-orang primitif dan barbar yang mengabaikan samasekali etika dan menyembah kepentingan diri sendiri. Dengan serangkaian asumsi ini perilaku India, Cina dan Myanmar dijelaskan.

Di sisi lain, bersamaan dengan berakhirnya perang dingin isu HAM menjadi agenda penting masyarakat global. Konsep keamanan di zaman baru memiliki definisi yang jauh lebih kompleks dan rumit ketimbang konsep keamanan di era perang dingin. Bila dulu keamanan hanya dimaknai sebagai keamanan negara (*national security*) kini keamanan juga berarti kemanan manusia (*human security*). Munculnya konsep baru ini tentu bukan tanpa implikasi, serangkaian kontradiksi pun muncul dan

menjadi perdebatan sengit. Dalam konteks perdebatan ini HAM menjadi salah satu unsur penting yang tak pernah habis diperdebatkan bahkan diyakini untuk waktu yang sangat lama di masa depan.

Bangsa-bangsa barat memahami HAM sebagai serangkain nilai dasar setiap manusia yang berlaku secara universal dengan tidak menghiraukan keragaman suku, agama, ras maupun bangsa, sejalan dengan argumen ini Donnelly seperti dikutip oleh Aleksius Jemadu, membahasakan "*human right are the right one has simply by virtue of being a human being*" (Jemadu, A., 2008, 285). Sehingga, karena ia bersifat universal maka berbagai intervensi terhadap negara lain untuk menegakan HAM dapat dibenarkan.

Sementara di sisi yang berbeda negara-negara non barat memaknai HAM sebagai berbasis nilai-nilai lokal. Negara-negara Asia misalnya menawarkan sejumlah konsep seperti *cultural relativism*, *communitarianism* dan *developmentalism*. Lebih jauh bahkan Negara-negara non barat memaknai definisi barat terhadap HAM yang universal kerap kali justru menjadi instrument politik untuk menaklukan bangsa lain. Invasi Amerika ke Irak (2003) yang berdalih demokratisasi dan HAM, serta ke Afganistan (2001) yang diklaim sebagai perang melawan terorisme misalnya dapat ditunjuk sebagai contoh yang gamblang. Perdebatan berbelit yang sarat kepentingan terkait konsep HAM inilah yang kerap berkontribusi terhadap buruknya implementasi HAM.

HAM di Myanmar

Rezim otoriter selalu identik dengan pelanggaran HAM, contoh paling dekat yang dapat ditunjuk adalah Orde Baru (Orba) di Indonesia. Kekejaman rezim Orba dapat dilihat dari serangkaian pembantaian orang-orang yang diduga terlibat PKI di paruh ke dua dekade 60 an; penembakan misterius (petrus) terhadap orang-orang yang dianggap berbahaya dalam kaca

mata penguasa; aneka pelanggaran HAM di Aceh; Papua, Maluku hingga Timor Timur (sekarang Timor Leste) serta masih banyak lainnya.

Di Myanmar tidak kalah mengerikannya, Junta memiliki prestasi yang sangat buruk dalam penghormatan terhadap HAM. Peristiwa paling terkenal adalah tragedi 8-8-88 yakni peristiwa pembantaian yang dilakukan rezim militer tanggal 8 Agustus 1988 pada waktu gerakan pro demokrasi di Myanmar melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menggugat penguasa.

Secercah harapan sejatinya muncul ketika pada 7 November 2010 pemerintah menyelenggarakan pemilu, namun masyarakat global nampak sangat skeptis terhadap pesta demokrasi di Myanmar. Hal ini wajar, karena di saat yang bersamaan Junta tidak kunjung membebaskan Suu Kyi dari tahanan rumah.

Pembebasan baru dilakukan menjelang pemilu. Tidak hanya itu partai yang dipimpin Suu Kyi, *National League for Democracy* (NLD) pun dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*) partai-partai yang dilarang ikut pemilu. Dengan serangkaian langkah tersebut, Junta sejatinya hendak mengunci mati gerakan pro demokrasi di Myanmar.

Buruknya penyelenggaraan pemilu memunculkan reaksi dari masyarakat global. Sikap pesimis terhadap perkembangan demokrasi di Myanmar nampak dari aneka respon yang ditujukan terhadap hasil pemilu. Presiden ASEAN *Inter-Parliamentary Myanmar Caucus* (AIPMC) Eva Kusuma Sundari misalnya mengomentari dengan nada kecewa: "Hasil pemilu Myanmar harus ditolak. Alasannya, pemilu yang digelar Junta itu tidak memiliki unsur sebagai pemilu yang bebas dan bersih" (tempointeraktif.com: Indonesia Diminta Tolak Hasil Pemilu Myanmar). Kutukan juga muncul dari Komite HAM PBB, dengan mengatakan bahwa hasil pemilu tersebut adalah kecurangan (International.okezone.com, 21/12/2010).

Sikap aneh India-Cina

Uniknya, berbeda dengan mayoritas masyarakat internasional yang mengutuk pemerintahan militer Myanmar, karena aneka kebijakannya yang represif, sarat dengan pelanggaran HAM dan sangat otoriter, India dan Cina justru memilih langkah yang sangat tidak populer. Berbagai kontrak kerjasama telah dilakukan kedua negara dengan Myanmar. Aneka kesepakatan, bantuan ekonomi, saling kunjung-mengunjungi antar pejabat negara telah dilakukan. Bahkan Jenderal dengan pelanggaran HAM berat, Than Shwe, yang memimpin penumpasan aksi rohaniwan Buddhis pro demokrasi dengan kekerasan pada tahun 2007, telah mengunjungi museum Pahlawan Kemerdekaan India dan Pejuang Anti kekerasan Mahatma Gandhi (Internasional okezone, 21/12/2010).

Dalam kunjungan yang berlangsung 25 hingga 29 Juli 2010 itu, Than Shwe menandatangani sejumlah kesepakatan diantaranya (1) pencegahan penyelundupan senjata dari India ke Myanmar.; (2) Bank EXIM India menyediakan kredit 60 juta dollar AS (sekitar Rp 540 miliar) kepada Myanmar untuk membiayai proyek pembangunan rel kereta api; dan (3) India turut mendorong kerjasama sektor migas dengan rencana mengimpor gas, untuk itu disiapkan dana 1 miliar dollar AS demi mengembangkan sektor migas di Myanmar (international.okezone.com: PBB Kutuk Hasil Pemilu Myanmar).

Padahal jika menengok sejarah hubungan kedua negara, terutama ketika demonstrasi para aktivis pro demokrasi 1988, India begitu anti terhadap Myanmar. Hal ini nampak misalnya dari sikap PMS Malik, Duta Besar India, yang begitu keras melawan rezim represif Junta, bahkan kantor perwakilan India di Myanmar kala itu menjadi rumah sakit sementara bagi para demonstran yang terluka (Renaud, E: 2003, 3).

Sikap serupa (mendekati Myanmar) juga ditunjukkan Cina, tidak hanya nilai perdagangan Cina-Myanmar yang

meningkat, seperti kasus perdagangan India Myanmar. Cina juga menanamkan banyak investasi di negeri Junta dan memberikan beragam bantuan infrastruktur.

Kepentingan India, Cina dan Myanmar

Ekonom Goldman Sachs (bank investasi terbesar AS) pada tahun 2001 meramalkan India—disamping Brasil, Rusia dan Cina yang kemudian dikenal dengan singkatan BRIC—akan menjadi ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 (Media Indonesia: RI berpeluang masuk kelompok raksasa baru, 17). Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat India dan Cina memiliki serangkaian konsekuensi kebutuhan yang dapat ditemukan di Myanmar. Beberapa diantaranya yaitu:

Pertama, kedua negara memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap sumber energi untuk menggerakkan industrialisasi di dalam negeri. Kandungan gas dan minyak bumi di Myanmar menjadi sangat penting di mata negara-negara yang secara ekonomi sedang melaju sangat kencang. Hubungan baik mereka dengan junta akan membuka akses ke sumber energi di Myanmar. Terlebih lagi secara geografis kedua negara berbatasan secara langsung dengan Myanmar yang artinya biaya yang harus ditanggung ketika mereka mengakses energi alam dari Myanmar akan jauh lebih kecil ketimbang biaya yang harus mereka bayar ketika mengimport enegi dari misalnya Timur Tengah.

Kedua, bagi India, negara junta ini menjadi semacam jembatan darat (*land bridge* meminjam istilah Mohan, C. R., 2010, 2) untuk aneka produk India yang akan menyerbu konsumennya di Asia Tenggara atau setidaknya Indocina. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah Asia Tenggara memiliki penduduk hingga setidaknya setengah milyar, bahkan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (Indonesia) berada di kawasan ini. Makna jumlah penduduk yang banyak

bagi negara-negara industri maju seperti India dan Cina adalah dua, konsumen dan buruh murah.

Dalam konteks ini maka Myanmar menjadi sangat penting di mata India. Memiliki hubungan baik dengan Junta bagi India berarti memotong ongkos transportasi produk-produk India yang akan diekspor ke Asia Tenggara. Karena selain beresiko tinggi, perjalanan laut memiliki ongkos yang lebih mahal ketimbang jalur darat. Selain itu Asia Tenggara di mata India juga merupakan pasar regional yang senyap dari persaingan bila dibandingkan Eropa dan Amerika. Satu-satunya pesaing handal India di kawasan ini hanyalah Cina.

Bila Myanmar menjadi satu-satunya jembatan produk-produk India menuju Asia Tenggara, maka tidak demikian dengan Cina. Cina kendati memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap pasar di kawasan sebelah selatannya namun ketergantungan Cina terhadap Myanmar sebagai jalur darat tidak sekuat India, karena akses Cina ke Asia Tenggara selain dihubungkan oleh Myanmar juga oleh Vietnam dan Laos.

Ketiga, Bagi Myanmar, dalam situasi diasingkan oleh aneka kritik tajam masyarakat internasional yang dialamatkan kepadanya karena berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan, Junta masih memiliki peluang untuk tetap eksis. Buruknya perlindungan terhadap HAM mencitrakan Myanmar sebagai negeri yang tidak atau setidaknya kurang menarik bagi para investor, namun tidak bagi para investor dari India dan Cina, mereka mampu melihat aneka peluang yang ditawarkan Junta ketika justru para investor lain enggan datang ke Myanmar, karena alasan keamanan.

India bahkan berkomitmen membangun infrastruktur Myanmar, yang maknanya Myanmar dalam jangka waktu panjang akan menjadi tempat penting yang menjadi bagian dari sirkulasi ekonomi para pebisnis India. Di sisi lain Junta juga pandai dalam memainkan “kartu” gas alam dan minyak bumi. Mengetahui dua tetangga dekatnya menjadi kekuatan kunci

ekonomi global maka peluang untuk melakukan politik "dagang sapi" sebagai strategi keluar dari marginalisasi masyarakat global pun dilakukannya. Myanmar menjadi sangat berarti bagi India dan Cina, sehingga selesailah sudah cerita embargo trio Amerika, Eropa dan PBB.

Aneka kemungkinan implikasi terhadap HAM

HAM menjadi isu utama terutama paska perang dingin, bahkan pada perkembangannya sangat menentukan citra suatu negara di mata negara lain, setidaknya hal tersebut diharapkan oleh para pejuang HAM. Negara dengan pelanggaran HAM tinggi akan sulit dalam diplomasi global. Penghentian sementara kerjasama militer Indonesia-Amerika menjadi contoh yang *apik* terkait hal tersebut. Setelah tragedi pembantaian di pemukiman Santa Cruz, Dili, Timor Timur, 12 November 1991 yang mengakibatkan sedikitnya 200 orang tewas, hubungan kedua negara yang sebelumnya harmonis menjadi "porakporanda" (Silaen, V., 2009, 2). Pelanggaran HAM yang dilakukan Komandan Pasukan Khusus (Kopasus) di Timor Timur (sekarang Timor Leste), dalam perkembangannya, selalu menjadi batu sandungan bagi hubungan kedua negara.

Hal ini jugalah yang sudah sewajarnya terjadi dengan Myanmar, namun kepentingan India dan Cina nampaknya semakin mengkaburkan kontruksi wacana penghormatan terhadap HAM sebagai basis hubungan antar negara. Hemat penulis, terdapat serangkaian implikasi dari kedekatan India dan Cina terhadap Myanmar yang mengancam penegakan nilai-nilai HAM.

Pertama, di tengah hujatan dari masyarakat internasional untuk memarginalkan Junta dari hubungan internasional karena buruknya penghormatan rezim militer tersebut terhadap HAM, mendekatnya kedua negara besar Asia itu membuat Junta mendapat angin segar. Aneka bantuan yang berasal dari India dan Cina tidak hanya menguatkan basis ekonomi Junta namun

juga mereduksi habis-habisan tekanan internasional terhadap Junta, sehingga bukan tidak mungkin justru berbanding terbalik semakin menguatkan kembali semangat otoritarianisme Junta yang maknanya memperbesar kemungkinan munculnya berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Kedua, di tingkat global realisme politik India dan Cina semakin memperpanjang jalan terjal berliku masyarakat global dalam mengupayakan perdamaian dan demokratisasi di Myanmar. Kemungkinan buruk lainnya adalah efek domino dari kepongahan Junta. Rezim-rezim otoriter di Asia Tenggara bukan tidak mungkin mengikuti langkah Junta, dengan memanfaatkan interdependensi ekonomi sebagai basis upaya dalam men *counter* embargo.

Ketiga, terbangunnya pesimisme masyarakat global terhadap penegakan HAM, serta menguatnya asumsi bahwa para mafia dan bandit yang memiliki akses besar terhadap ekonomi memiliki wewenang untuk melakukan pelanggaran HAM dengan tanpa konsekuensi apapun, seperti yang dilakukan Junta. Junta dengan akses ekonomi dari dua kekuatan *super power* baru seakan memiliki kebebasan terhadap berbagai tindakan sekalipun tidak bermoral.

Keempat, membuka kemungkinan yang lebih lebar bagi munculnya aksi kekerasan, baik yang muncul dari Junta maupun sebagai respon terhadap sikap Junta. Aksi kekerasan jenis ke dua ini kerap kali dimaknai oleh rezim penguasa sebagai terorisme dan aksi makar. Dalam konteks ini maka kekerasan memiliki format yang lebih kompleks yakni tidak hanya satu arah namun dua arah secara sepinal.

Kelima, dan yang paling penting yaitu akses ekonomi India dan Cina akan mematikan atau setidaknya melumpuhkan gerakan demokrasi dan HAM di Myanmar yang artinya upaya panjang dengan korban yang tak terhitung dalam memperoleh kebebasan politik menjadi kehilangan makna ketika India dan Cina justru mendekati diri kepada Junta.

Serangkaian implikasi tersebut sejatinya tidak perlu terjadi bila kedua negara yang sedang naik daun dalam pergulatan ekonomi global tersebut menjunjung tinggi etika pembangunan dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Sudah selayaknya prestasi penghormatan HAM suatu negara menjadi basis penghormatan negara-negara lain terhadap negara tersebut. Kendati pendapat ini nampak terlampau utopis namun, hemat penulis, langkah tersebut menjadi langkah konkrit yang paling mungkin dilakukan dalam konteks menegakkan nilai-nilai HAM.

Penutup

Hubungan internasional selama ini dikonstruksi di atas basis gagasan realisme politik. Sulit dipungkiri realisme dalam perjalannya tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis dalam memahami realitas hubungan internasional, bahkan dalam tingkat tertentu justru memengaruhi perilaku aktor-aktor dalam bertindak laku. Cerita anarkisme hubungan internasional sejatinya tidak akan pernah terjadi andai saja konstruksi gagasan yang dikembangkan tidak berbasis realisme. Etika dan norma yang berpihak kepada penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia sepertinya akan menjadi basis yang tepat untuk membangun ide dunia damai.

Hubungan India-Cina-Myanmar menjadi contoh *apik* betapa nilai HAM belum—bila enggan mengatakan *tidak*—menjadi acuan perilaku ketika realisme sudah mengakar sangat kuat dalam sanubari para pelaku politik internasional. HAM justru dianggap sebagai omong kosong dan tidak sebanding manfaatnya dengan pembangunan ekonomi.

Referensi

- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mohan, C. Raja. (2010). "Embrancing Myanmar: India's Foreign Policy Realism", dalam *RSIS COMMENTARIES*.
- Renaud, Egreteaud. (2003). "India and Burma/ Myanmar Relations From Idealism to Realism". (paper draft). Conference on *India and Burma/ Myanmar Relations: From Idealism to Realism*. Thursday 11th September 2003, Conference Room I, India International Center, New Delhi, India.
- Silaen, Victor. (2009). "Pasang Surut Hubungan dan Kerja Sama Militer AS-RI" *Verity Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun 1, Nomor 2, Juli-Desember . Tangerang: Jurusan Hubungan Internasional. UPH.
- Srikandi, AG. (2010). *Humaniterian Action and Responbility to Protect in Myanmar: The Political Willingness of the Myanmar Government after Cyyclone Nargis*. (makalah dalam seminar IIS-FISIPOL-UGM, Mei 2011).
- "Oil and Gas in Myanmar" diakses dari http://birmanie.total.com/en/contexte/p_1_2.htm, Kamis 23 Des 2010: 11:43 WIB.
- "Indonesia Diminta Tolak Hasil Pemilu Myanmar" *Tempo Interaktif*, Senin 15 November 2010-14:41 wib., diakses dari: <http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/11/15/brk,20101115-291979,id.html>, selasa 21 des 2010, pukul 10:30 WIB.
- "PBB Kutuk Hasil Pemilu Myanmar" Jum'at, 19 November 2010 - 11:08 wib diakses dari: <http://international.okezone.com/read/2010/11/19/18/394786/pbb-kutuk-hasil-pemilu-myanmar>, Selasa 21 Des 2010, pukul 10:30 WIB.
- "RI berpotensi masuk kelompok raksasa baru" harian *Media Indonesia*. Rabu, 3 November 2010.

BAB 4

DOMINASI INVESTASI ASING DI INDONESIA: FAKTOR DAN IMPLIKASI

Pendahuluan

Paradigma pembangunan yang berbasis pikiran liberal tidak mensyaratkan pemerataan ekonomi sebagai tolak ukur pertumbuhan. Logika ini mendorong sebagian negara berkembang termasuk Indonesia berfokus pada upaya menarik sebanyak mungkin investasi asing. Cara instan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi seperti ini bukan tanpa resiko. Selain menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dan konsentrasi modal pada aktor-aktor tertentu, investor asing akan dengan seandainya saja henggang dari suatu negara ketika tidak lagi diuntungkan, hal yang relatif enggan dilakukan investor domestik. Sayangnya porsi investasi domestik semakin mengecil bila dibandingkan dengan porsi investasi asing yang justru semakin membesar (lihat tabel 4.1: Realisasi Investasi).

Tulisan ini bermaksud menyoal "potongan kue" investasi asing di Indonesia yang dari tahun-ketahun semakin membesar, namun disaat bersamaan porsi investasi dalam negeri semakin mengecil. Secara lebih spesifik serangkaian pertanyaan paralel berikut akan menuntun tulisan ini. Mengapa pola tersebut terjadi? Apa saja kemungkinan kebijakan untuk merespon pola tersebut? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan kemungkinan pilihan kebijakan itu? dan bagaimana respon para pelaku ekonomi (baik pemerintah maupun non pemerintah) terhadap pola itu? Mengapa pilihan sikap itu yang dipilih? Apa implikasinya terhadap perekonomian nasional?

Pola investasi asing

Ilmuan berbeda pendapat dalam mengukur tingkat perekonomian suatu negara. *Pertama*, kelompok yang berargumen bahwa tingkat perekonomian suatu negara

sejatinya merupakan total produksi yang dikerjakan di dalam negeri baik yang dilakukan oleh produsen dalam negeri maupun asing. Kelompok ilmuwan ini membuat barometer yang dikenal dengan sebutan *Gross Domestic Product (GDP)*; dan kedua, kelompok yang berpendapat bahwa tingkat perekonomian suatu negara sesungguhnya merupakan akumulasi semua produksi yang berasal dari suatu negara baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Golongan ini menggunakan *Gross National Product (GNP)* sebagai tolak ukur (Mas'ood, M., 2011).

Penulis cenderung memilih cara kedua, karena: *pertama*, logika penghitungan *GDP* akan mendorong pemerintah untuk berfikir instan dalam meningkatkan perekonomian negara. Upaya yang akan dilakukan pemerintah biasanya diarahkan untuk menarik investor asing ke dalam negeri, dengan aneka kebijakan memperlonggar arus investasi. Di saat yang bersamaan pemerintah malas untuk menguatkan investasi dalam negeri.

Kedua, penggunaan *GNP* sebaliknya akan mendorong pemerintah untuk memperkuat basis investasi dalam negeri. Kendati membutuhkan energi dan waktu yang tidak sebentar namun investasi dalam negeri yang kuat berimplikasi pada perekonomian domestik yang relatif stabil, sehingga perekonomian tidak terlalu bergantung pada perekonomian global yang fluktuatif. *Ketiga*, iklim investasi dalam negeri yang buruk akan dengan mudah mendorong investor asing untuk memindahkan investasinya ke negara lain. Hal serupa tentu tidak (atau setidaknya sulit) berlaku bagi investor dalam negeri. Mereka cenderung memilih bertahan di dalam negeri karena berbagai alasan. Dengan demikian hemat penulis pengukuran kekayaan negara berbasis *GNP* relatif lebih aman ketimbang *GDP*.

Keempat, pengukuran kekayaan negara berbasis *GDP* mengabaikan secara telak pemerataan kekayaan, sehingga sangat mudah ditemukan negara yang kendati pertumbuhannya

sangat fantastis namun angka kemiskinannya sangat besar. India dan Cina menjadi dua negara yang dapat ditunjuk untuk kasus ini. Sementara penggunaan *GNP* sangat berpotensi menciptakan pemerataan dengan tidak mengabaikan pertumbuhan.

Dinamika investasi asing di Indonesia menunjukkan pola positif. Hal ini tentu bukan tidak berkaitan dengan cara penghitungan pemerintah yang berbasis *GDP*. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, penggunaan tolak ukur kekayaan negara berbasis *GDP* akan menuntun pemerintah untuk memproduksi berbagai kebijakan yang akan membuka secara lebar-lebar pintu bagi investasi asing. Cara seperti ini diyakini akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam negeri dengan cepat.

Berbagai peristiwa yang meningkatkan ancaman keamanan seperti tragedi Mesuji (Lampung), Freeport (Papua), Lapindo (Jawa Timur) dan kasus-kasus lain serupa membuat pemerintah begitu khawatir dan sibuk meyakinkan para investor asing bahwa Indonesia sudah aman dan sangat layak sebagai tempat berinvestasi, bersamaan dengan itu pemerintah abai terhadap eksistensi para investor dalam negeri. Lihat tabel 4.2: Arus Investasi dari dan menuju Indonesia dan tabel 4.3: Nilai Neto Arus PMA ke Indonesia.

Mengapa investasi asing di Indonesia cenderung meningkat? Sedikitnya ada dua alasan. *Pertama*, kebijakan liberalisasi ekonomi pemerintah. Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah tidaklah sendirian. Beragam aktor seperti investor (baik asing maupun domestik), para aktivis lingkungan, organisasi buruh, media massa, maupun masyarakat sipil secara umum berlomba-lomba mempengaruhi arah kebijakan baik secara langsung maupun tidak, formal maupun tidak, bahkan legal maupun tidak (Oatley, Thomas: 2004).

Investor asing sangat diuntungkan dengan liberalisasi ekonomi suatu negara. Biasanya mereka menyukai negara dengan 3 ciri: (a) regulasi lingkungan yang buruk, sehingga

misalnya tidak perlu memikirkan limbah perusahaan; (b) upah buruh murah, sehingga memangkas biaya produksi; dan (c) pemerintah yang mudah disuap, sehingga mudah melakukan perijinan (Hiarie, E., 2011). Tiga ciri ini terdapat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kebijakan liberalisasi ekonomi di Indonesia yang tercermin dalam UU No. 10/ 1998 tentang Perbankan, UU No. 22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No 19/ 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No 25/ 2007 tentang Penanaman Modal sulit dipungkiri tidak berkaitan dengan intervensi para pelaku ekonomi asing.

Kedua, lemahnya daya saing para pelaku ekonomi domestik. Kekuatan pelaku ekonomi domestik bisa didorong oleh banyak faktor, diantaranya: modal, *skill* dan kultur. Para pelaku ekonomi domestik memiliki derajat yang rendah bila ditinjau dari sisi ketiga faktor tersebut. Dua faktor inilah yang mengkondisikan dominasi investor asing atas investor domestik di Indonesia.

Pilihan Kebijakan

Bila porsi investasi asing dibiarkan semakin besar dan tidak sebanding dengan porsi investasi dalam negeri maka perekonomian dalam negeri akan sangat rentan, karena bagian besar penyusun kekayaan negara menjadi tidak dapat dikontrol pemerintah. Komputerasasi perekonomian global semakin mempermudah dan membuka peluang lebar perpindahan modal. Dalam situasi semacam ini maka sedikitnya terdapat 3 kemungkinan kebijakan yang dapat diterapkan beserta aneka implikasi siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan tersebut (lihat tabel 4.4: Pilihan Kebijakan:Siapa yang diuntungkan dan dirugikan?).

Pertama, membuka arus investasi asing. Kebijakan ini tentu mengandung banyak konsekuensi dan bukan tanpa resiko. (1) pemerintah harus sanggup meyakinkan para investor asing agar mau menanamkan modal di dalam negeri; (2) pemerintah

harus menjamin keberlangsungan Investasi asing; (3) kegagalan pemerintah dalam melakukan dua hal tersebut akan berakibat fatal, investor bisa saja menarik investasinya dan memindahkan ke negara lain. Bila hal ini terjadi maka perekonomian suatu negara yang ditopang oleh investasi asing dengan porsi besar akan mengalami krisis finansial ekstrim.

Dalam konteks kebijakan liberalisasi, maka konsumen dan investor asing akan sangat diuntungkan, namun sebaliknya investor dalam negeri akan tertekan, bila mereka tidak dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Sementara itu pemerintah akan menghadapi kesulitan luar biasa ketika para investor asing menarik modal mereka, kendati tentunya pemerintah juga akan diuntungkan bila investasi asing bertahan dan terus bertambah akumulasinya di dalam negeri.

Kedua, menutup investasi asing, pilihan ini tentu juga bukan tanpa resiko. Menguatkan basis investasi dalam negeri bukanlah pekerjaan gampang, terlebih lagi bagi negara yang dalam waktu lama telah bergantung pada investasi asing. Kegagalan pemerintah dalam mengkondisikan iklim investasi dalam negeri agar berkembang, alih-alih memproduksi pertumbuhan ekonomi justru dapat mematikan perekonomian domestik.

Kebijakan ini akan menguntungkan investor domestik, regulasi yang dibuat pemerintah akan memudahkannya. Di sisi lain konsumen akan mengalami kesulitan karena harga dapat dimainkan oleh produsen tanpa harus melakukan kompetisi sengit dengan para pesaing dari luar negeri, kecuali bila terjadi persaingan harga di antara para produsen dalam negeri tentu konsumen akan diuntungkan. Pemerintah akan mendapat tekanan dari agen-agen liberalisasi ekonomi. Bila perekonomian memburuk berimplikasi pada keroposnya legitimasi pemerintah.

Ketiga, moderat, yakni membatasi investor asing dan bersamaan dengan itu mengokohkan investasi dalam negeri.

Cara ketiga nampaknya paling mungkin dilakukan, namun harus dengan “itung-itungan” matang. Misalnya batasi investasi asing dalam kurun waktu 10 tahun saja, bersamaan dengan itu pacu masyarakat untuk belajar pada para pendatang itu. Kemudian secara bertahap perketat arus investasi dari luar melalui berbagai regulasi, sementara sebaliknya dorong dan perlonggar partisipasi para pelaku ekonomi domestik untuk memperkokoh perekonomian dalam negeri. Bila cara ketiga ini berjalan sesuai rencana, maka secara bertahap porsi investasi dalam negeri akan semakin kuat dan porsi investasi luar negeri akan menurun. Pola ini akan memperkokoh perekonomian dalam negeri. Keluar masuknya arus modal tidak akan memiliki pengaruh berarti.

Kebijakan Pemerintah RI

Sedikitnya terdapat 4 undang-undang kunci paska reformasi 1998 yang menunjukkan pola liberalisasi kebijakan pemerintah, yaitu: UU No. 10/ 1998 tentang Perbankan, UU No. 22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No 19/ 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan UU No 25/ 2007 tentang Penanaman Modal. Serangkaian aturan perundangan yang kait terkait secara paralel ini menjadi indikator yang menunjukkan betapa pemerintah sangat antusias terhadap liberalisasi ekonomi.

Pertama, UU No. 10/ 1998 tentang Perbankan, sejatinya merupakan evolusi dari UU No. 7/ 1992 tentang Perbankan, hanya saja UU No. 10/ 1998 lebih ekstrim membuka arus investasi asing ketimbang UU sebelumnya, karena UU baru ini tidak menyediakan jaring pengaman dari liberalisasi, terutama manajemen resiko (Rais, A., 2008). Secara implisit di dalam Bab Umum dari penjelasan UU No. 10/ 1998 tertulis:

“Upaya liberalisasi dibidang perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.”

Kedua, UU No. 22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menurut Hendri Saparini dari Tim Indonesia Bangkit, sebagaimana dikutip Amien Rais (2008), telah diijonkan ke pihak asing untuk ditukar dengan hutang. *Ketiga*, UU No 9/ 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam alenia pertama Bab Umum, butir kedua, di tulis: “BUMN juga merupakan salah satu sumber negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasl privatisasi”. BUMN, dengan demikian, sudah masuk dalam kategori dapat diprivatsasi. Dan *keempat*, UU No 25/ 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Bab V pasal 6, ayat 1 ditulis “pemerintah memberi perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun....sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan kebijakan berbasis aturan perundangan tersebut, investor asing sangat diuntungkan, baik secara (1) kekayaan sumber daya alam; maupun (2) populasi yang sangat besar, yakni: 243 juta jiwa yang maknanya bahan baku dan buruh murah selain konsumen yang berlimpah. Di sisi lain investor domestik, andai saja diperlakukan sama pun, belum (bila enggan untuk mengatakan: tidak) sanggup bersaing dengan para pendatang baru dari luar negeri karena keterbatasan *skill* dan modal.

Di sisi lain konsumen sangat diuntungkan oleh liberalisasi ekonomi, karena selain kompetisi di antara para pemain ekonomi akan menurunkan harga, banyaknya para pemain juga menyediakan beragam pilihan produk dan jasa bagi mereka. Desakan kepentingan konsumen dan investor asing terhadap pemerintah semakin menyudutkan para pemain ekonomi domestik. Iklim investasi seperti ini menciptakan ekonomi nasional rentan, sedikit gejolak memicu para investor asing untuk menarik modalnya.

Penutup

Pilihan kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah sejatinya merupakan refleksi dari tarik ulur kepentingan aktor-aktor ekonomi politik. Siapa yang paling kuat dan memiliki akses ke dalam proses produksi kebijakan, bagaimana preferensi kebijakan yang mereka usung serta apa kepentingan mereka?, menjadi acuan yang akan menuntun dan mendorong arah suatu kebijakan ekonomi. Dalam kasus Indonesia, maka si kuat itu adalah investor asing yang dalam banyak sisi memiliki keselarasan kepentingan dengan rezim penguasa, sehingga tidak heran bila aneka kebijakan yang dihasilkan penguasa justru memfasilitasi dan menguntungkan mereka dan pada saat yang bersamaan seringkali mengabaikan kepentingan warga negara.

Referensi

- Hiarie, E. (2011). *Etika Pembangunan (Materi Kuliah. S 2 HI UGM)*.
- Mas'od, M. (2011). *Perdagangan dan Investasi Internasional (Materi Kuliah. S 2 HI UGM)*.
- Oatley, T. (2006). *International Political Economy: Interests and Institutions in Global Economy*. New York: Pearson.
- Rais, M. A. (2008). *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Tambunan, Tulus (2006) *Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi*. Kadin Indonesia-Jetro, 2006, diakses dari: www.kadin-indonesia.or.id 1, Senin 27 Juni 2011, pukul 17:05 WIB.
- "Tabel Realisasi Investasi", *Portal Resmi Pemerintah*, diakses dari <http://www.indonesia.go.id/>, Senin 27 Juni 2011, pukul 17:05 WIB.
- Tabel Arus Investasi dari dan menuju Indonesia (2004-2007), diakses dari <http://armyalghifari.wordpress.com/2010/07/06/sadar-kita-bukan-kuli>, Senin 27 Juni 2011, pukul 17:05 WIB.

BAGIAN KE TIGA ISU REGIONALISME

BAB 5

MENAKAR KOMUNITAS ASEAN 2015

Pendahuluan

Selama tiga hari (23-25 Oktober 2009) para pemimpin Negara-negara ASEAN berkumpul di Hun Hin (Thailand) untuk menyelenggarakan “ritual tahunan”, Konferensi Tingkat Tinggi ke-15. Salah satu yang diperbincangkan oleh para *top leader* Negara-negara itu adalah Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Gagasan tersebut sebenarnya sudah muncul setidaknya sejak KTT tak resmi ASEAN di Kuala Lumpur 15 Desember 1997, yang kemudian dikenal dengan ASEAN vision 2020.

Ide yang masih bersifat prematur itu kemudian dimatangkan dalam Bali *Concord II (Declaration of ASEAN Concord II)* dalam pertemuan puncak ASEAN ke-9, di Pulau Dewata. Para pemimpin ASEAN memproklamkan pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri atas tiga pilar, yaitu: Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ ASC*); Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community AEC*); dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Social-Cultural Community/ ASCC*).

Perkembangan selanjutnya, dalam KTT ke 12 ASEAN di Cebu, Filipina pada tanggal 12-13 Januari 2007 telah dicapai sebuah kebijakan strategis, yaitu menargetkan komunitas ASEAN pada 2015, atau mempercepat 5 tahun daripada target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tulisan ini bersifat prediktif, yakni meneropong masa depan Komunitas ASEAN. Seberapa besar kemungkinan gagasan ini dapat direalisasikan? Apakah seting geografis, sejarah, sosio kultur dan peta kepentingan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara memungkinkan terwujudnya gagasan tersebut? Lalu apa yang seyogyanya dilakukan oleh para pemangku jabatan agar gagasan komunitas ASEAN mewujud? Serangkaian

pertanyaan tersebut akan menuntun pembahasan dalam tulisan ini.

Berbeda dengan dua kerja ilmiah yang lain, *deskripsi* dan *eksplanasi*, *prediksi* dianggap sebagai kerja yang lebih canggih, karena itu ia lebih sulit, namun tentunya bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Salah satu indikator kematangan suatu disiplin ilmu, termasuk ilmu Hubungan Internasional, adalah kemampuannya dalam membuat prediksi, proyeksi masa depan atau menentukan aneka kemungkinan di masa yang akan datang. Manfaat yang paling nyata dari prediksi yaitu mengontrol masa depan. Bila sudah diketahui aneka kemungkinan yang bakal terjadi, maka hal ini tentu akan sangat membantu para pembuat kebijakan untuk menentukan aneka alternatif kebijakan yang dianggap paling efektif.

Konsep Komunitas

Terdapat beragam definisi dengan jumlah yang sangat banyak tentang konsep komunitas (*community*). Para ilmuwan seperti Ferdinand Tönnies, Robert D. Putnam, McMillan, Chavis dan yang lainnya telah memberikan beragam pemahaman tentang konsep tersebut.

Kendati definisi, pengertian dan pemahaman ditujukan pada konsep yang sama, yakni: komunitas, namun definisi-definisi tersebut menekan pada *counter*, sisi dan ruang yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan berfokus pada masyarakat sebagai sebuah wilayah geografis; beberapa yang lain pada sekelompok orang yang tinggal di tempat tertentu; dan sebagian yang lain lagi memahami masyarakat sebagai wilayah kehidupan bersama (Smith, M. K., 2001).

Lebih jauh, setelah mempelajari beragam definisi komunitas yang disampaikan para ilmuwan, Smith telah menyimpulkan, sedikitnya terdapat 3 cara dalam memahami komunitas, yaitu: *pertama: place* atau tempat, yakni memahaminya dari sisi teritorial, geografis ataupun wilayah,

kedua: interest atau kepentingan, yakni meneropongnya dari kesamaan kepentingan, fokus, minat serta karakteristik umum; dan *ketiga: communion* yakni persekutuan, kelompok, kebersamaan sehingga kendati secara fisik individu-individu tidak bertemu, namun ketika terdapat hubungan di antara mereka, maka itu, oleh sementara ilmuwan, dapat dikategorikan sebagai komunitas.

Sekelompok orang yang kendati mereka secara fisik berada dalam tempat yang berbeda-beda dan jauh namun ketika terjadi interaksi diantara mereka, kemudian dalam benak mereka terdapat persepsi dan keyakinan bahwa mereka senasib, satu visi, sepenangungan, memiliki kualitas hubungan yang tinggi dan memiliki *interest* yang sama maka mereka disebut komunitas. Dimensi teritorial, mensyaratkan adanya kedekatan dan interaksi secara fisik, sementara dimensi hubungan (*relation*) tidak selamanya demikian. Dalam banyak kasus, kedekatan dan berbagai wilayah tidak dapat dengan sendirinya merupakan suatu komunitas, karena itu dimensi relasional juga sangat esensial (Luhulima, C.P.F., 2008, 18).

Komunitas dalam studi Hubungan Internasional

Dalam studi Hubungan Internasional, konsep komunitas sering kali dipinjam guna membantu memahami kerjasama multilateral oleh sejumlah Negara dalam suatu kawasan tertentu. Kendati terkadang terkesan dipaksakan, namun model komunitas harus diakui sangat membantu dalam upaya memahami kerjasama multilateral Negara-negara dalam sebuah kawasan.

Hubungan internasional kontemporer diwarnai dengan munculnya aneka pelaku dalam ranah internasional. Tidak hanya aktor konvensional: Negara, bermacam organisasi internasional baik pemerintah maupun non pemerintah, perusahaan multinational maupun beragam kelompok kepentingan dan penekan bahkan individu telah terhubung

dalam jejaring yang teramat rumit, kait terkait dengan sangat erat, berjaln berkelindan dengan sangat akut, bahkan saling tergantung satu sama lain. Seting global inilah yang kerap kali disebut sebagai pola :*complex interdependence*.

Robert Keohane dan Joseph Nye, lebih jauh menjelaskan, sedikitnya ada tiga indikasi yang menunjukkan *complex interdependence* sedang beroperasi, yaitu: (1) *multiple chanel*, yakni aneka aksi reaksi yang terjadi dalam hubungan internasional berlangsung melalui banyak jalur, tidak lagi hanya *Government to Government*, bahkan hingga tingkat terendah *people to people*, sekeping permisalan yang dapat ditunjuk adalah jamaah Mujahadah Asmaa ul Husnaa dari Indonesia yang memiliki jaringan jamaah di Asia; (2) *multiple issu*, yakni tidak ada lagi dikotomi *high* dan *low politic*. Di era Perang Dingin dikotomi tersebut sangat tegas memposisikan isu keamanan sebagai *high politic*, sementara isu di luar keamanan sebagai *low politic*. Hierarki ini telah hilang di era paska perang dingin. Kendati isu keamanan tidak lantas sirna namun ia harus berbagi ruang dengan isu-isu baru, seperti HAM, lingkungan, *gender*, dsb.; (3) semakin kecilnya kemungkinan militer digunakan sebagai instrument dalam berhubungan dengan Negara lain (Jemadu, A., 2008, 46).

Complex interdependence inilah yang seanalog dengan konsep komunitas. Tidak hanya dalam tataran teoritis yang dikembangkan oleh para ilmuan sebagai model, dalam tataran praktis, para pembuat kebijakan (*decision making*) pun berupaya melalui aneka kebijakan yang dibuatnya dengan mendesain, menata, mengelola teretori suatu kawasan sebagai komunitas. Contoh apik adalah the *Concert of Europe* (1815-1853), yang bentuk paling canggihnya adalah Uni Eropa.

Sulit dipungkiri bahwa *Concert of Southeast Asian Nation* yang dirumuskan pada *Bali Concord II* terilhami oleh the *Concert of Europe* (Luhulima, C.P.F., 2008, 31). Kendati demikian, apa yang diupayakan para konseptor komunitas kawasan, bukan

tidak didahului oleh seting objektif kawasan yang hendak mereka desain menjadi sebuah komunitas. Diyakini ada kondisi-kondisi objektif yang berperan sangat penting, selain kemauan politik para *decision making* dalam mewujudkan komunitas kawasan, yaitu: seting geografis, seting masyarakat dan seting sejarah.

Sekuat apapun keinginan para pembuat kebijakan untuk mewujudkan tata komunitas kawasan, ketika tidak berada dalam kontek seting objektif yang berpotensi memunculkan komunitas kawasan, maka akan sangat panjang dan terjal jalan menuju komunitas kawasan.

Pembahasan

Sebagai metode pengelolaan kawasan, model komunitas kawasan tidak serta merta akan melewati jalan mulus. Ada sejumlah seting yang diyakini harus ada terlebih dahulu, selain kemauan politik warga Negara dan para pembuat kebijakan tentunya.

Sejumlah seting tersebut dipercaya terdapat di Eropa, sehingga bukan hal yang aneh bila kemudian regional ini tidak hanya mencapai tahap *European Community* (1967) bahkan jauh melampaui itu hingga mentransformasikan diri menjadi semacam “Negara supranasional”, Uni Eropa. Adapun sejumlah seting tersebut, yaitu: Geografis; Kesukuan dan agama; intensitas perang di masa lalu; serta yang tak kalah pentingnya ialah seting kemauan politik para penguasa di tingkat nasional di suatu regional untuk membentuk komunitas regional, seting terakhir diyakini memerankan peran kunci.

Seting Geografis Asia Tenggara

Seting Geografis tak pelak memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap aneka pola pilihan politik masyarakat yang menempatinya. Apakah seting geografis itu berupa bumi yang subur, tanah yang mengandung minyak dan kekayaan alam

lainnya, areal yang tandus, gurun pasir, bergunung-gunung, berbentuk kepulauan (nusantara) atau bahkan daratan luas (benua).

Areal yang mengandung energi misalnya, selalu akan menjadi rebutan bangsa-bangsa lain, lihat saja Timur Tengah yang memiliki kandungan minyak berlimpah. Bahkan korelasi Geografi dan politik memunculkan disiplin tersendiri yaitu, Geopolitik.

Secara geografis Asia Tenggara, dapat diklasifikasikan menjadi dua areal besar, yaitu: Asia tenggara daratan (ATD) yang terdiri dari: Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar dan Thailand; dan Asia Tenggara Maritim (ATM) yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai, Filipina dan Timur Leste. Dengan seting geografis seperti ini maka perpindahan manusia tidak akan semudah, misalnya, jika dibandingkan dengan perpindahan manusia di daratan Eropa. Seting geografis seperti ini, secara kasat mata memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap sulitnya proses integrasi masyarakat di Asia Tenggara, yang tentunya juga menghambat terciptanya komunitas ASEAN.

Keragaman Etnisitas dan Religiuitas

Seting sosiokultur masyarakat Asia Tenggara yang menempati 11 daerah teretori, termasuk Timur Leste—kendati hingga tulisan ini dibuat belum menjadi anggota ASEAN—merupakan masyarakat yang sangat majemuk, tidak hanya secara etnis, namun juga agama, ideologi dan keyakinanya sangat beragam. Di kamboja ada suku Khmer, Tionghoa, suku Vietnam, Cham; di Laos ada suku Lao, Lao Theung, Lao Soung; di Myanmar ada suku Burma, Shan, Karen, Rakhine; belum lagi di Indonesia, Malaysia dan yang lain.

Demikian pula agama di kawasan ini, begitu majemuk. Agama Buddha menjadi mayoritas di Thailand, Myanmar, dan Laos serta Vietnam dan Kamboja. Agama Islam dianut oleh

mayoritas penduduk di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Agama Kristen menjadi mayoritas di Filipina. Di Singapura, agama dengan pemeluk terbanyak adalah agama yang dianut oleh orang Tionghoa seperti Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Belum lagi budaya yang hidup beriringan dengan mereka. Tidak hanya sangat beraneka bentuknya namun juga sering sekali berkarakter egosentrisme.

Kemajemukan yang sangat akut dalam etnis dan keyakinan tentu berpengaruh pada proses integrasi menuju komunitas kawasan. Kendati gagasan ideal yang sering dikumandangkan adalah bahwa kemajemukan seyogyanya tidak diidentikan dengan potensi konflik namun fakta menyuguhkan betapa keberagaman etnis dan agama telah menciptakan fragmentasi masyarakat di kawasan ini. Berbeda dengan masyarakat di Asia Tenggara, di Eropa masyarakat relatif lebih homogen, kendati terdapat aneka varian dalam keyakinan dan budaya namun sulit dipungkiri bahwa keberagaman di Eropa tidak seakut di Asia Tenggara.

Intensitas Perang di masa lalu

Perang tidak dapat dipungkiri merupakan alasan utama yang menanamkan rasa rindu mendalam dalam benak manusia akan terciptanya dunia damai. Integrasi sebagai salah satu alternatif yang terbukti dapat memperkecil kemungkinan perang tak ayal menjadi pilihan untuk mencapai dunia damai yang diidamkan. Membandingkan sejarah perang di kedua region, Eropa dan Asia Tenggara, jelas berbeda. Kendati perang juga terjadi di Asia Tenggara dengan intensitas yang tidak kecil, perang di Eropa jauh lebih mematikan di lihat dari sisi negara yang terlibat, cakupan area dan kerugian, baik korban meninggal maupun materi.

Di Asia Tenggara, sebelum kehadiran Prancis dan Inggris, hubungan internasional diperankan oleh kerajaan-kerajaan. Di daratan Asia Tenggara misalnya, ada kerajaan Vietnam, Siem

(Thailand), Laos dan Khmer (Kamboja). Dua yang pertama merupakan kerajaan yang progresif dan ekspansionis sedang dua yang akhir merupakan kerajaan yang lemah dalam militer, walaupun demikian Khmer (Kamboja) memiliki wilayah yang luas dan berpenduduk paling makmur.

Sementara di daerah Maritim ada kerajaan Sriwijaya yang bertempat di Sumatra Selatan dan Majapahit di Jawa Timur. Sriwijaya bahkan merupakan kerajaan yang maju perekonomian dan perdagangan sehingga tak heran kerajaan-kerajaan besar di China tertarik untuk menjalin hubungan dagang. Setelah kedua kerajaan itu surut munculah kerajaan Malaka yang juga memiliki perekonomian yang kuat.

Sementara di ATD, Khmer dengan kemakmuran dan wilayahnya yang luas serta aksesnya ke laut membuat dua kerajaan ekspansionis yang mengapit dari barat dan timur, Siem dan Vietnam menjadi semakin agresif. Dari barat Siem berupaya merebut daratan Khmer sementara Vietnam alih-alih membantu Khmer justru malah menusuk dari arah timur. Kesempurnaan daratan Khmer ternyata belum cukup memuaskan Siem, sehingga Shiem masih berupaya meluaskan ekspansinya ke barat dengan menggempur Burma (Myanmar) dan ke selatan dengan menginvasi Malaka.

Intensitas perang di Asia Tenggara mereda setelah Prancis dan Inggris mendarat ke Asia Tenggara, namun setelah perang Vietnam usai (1975) Vietnam kembali meneruskan invasinya ke Kamboja. Kalau perang Vietnam (1975) merupakan wujud perpanjangan kepentingan Amerika dan Uni Soviet maka invasi Vietnam ke Kamboja muncul dari sifat agresifitas Vietnam (disadur dari Cipto, B., 2003, 9-13).

Sementara di sisi lain, Eropa merupakan kawasan yang "kenyang" dengan perang. Dua perang dunia di abad dua puluh yang memiliki efek global berporos di Eropa. Dengan melibatkan Inggris, US, AS, Cina, Jerman, Itali, Jepang serta memporak porandakan tidak hanya Eropa namun juga Asia Tenggara,

Timur Tengah, Mediteriana serta Afrika. Perang ini memakan korban hingga sedikitnya 50 juta jiwa.

Selanjutnya perang yang sedikit lebih kecil, perang dunia I (1914-1918) melibatkan Austria, Jerman, Turki, Bulgaria, Rusia, Perancis, Inggris, Kanada, Italia, AS. Dengan kerusakan parah yang tersebar di Eropa, Afrika, Timur Tengah, Kepulauan Pasifik dan Cina. Sementara korban nyawa manusia tidak kurang dari angka 40 juta.

Selain dua perang mematikan itu, perang Napoleon (1799-1815) tak kalah mengerikannya. Daratan Eropa menjadi ajang pertumpahan darah yang memilukan. 3.250.000-6.500.000 jiwa menjadi korban perang ini dengan sedikitnya tiga negara terlibat, yakni Prancis, Inggris, Rusia.

Fenomena perang di Asia Tenggara tidak sebanding kadar destruktifnya bila dibandingkan dengan perang di Eropa, daratan Eropa menjadi ajang perang dunia I dan II yang merupakan perang terbesar sepanjang sejarah umat manusia sehingga tak ayal jika pengaruh psikologis yang dimunculkan perang Eropa terhadap semangat integrasi bangsa Eropa jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pengaruh psikologis perang di Asia Tenggara terhadap semangat integrasi di Asia Tenggara. Semangat integrasi Eropa (yang juga bisa dimaknai sebagai tingginya harapan untuk menghindari perang) bisa di lihat dari jumlah organisasi regional yang ada di Eropa. Hingga tahun 1989 saja misalnya di Eropa ada sedikitnya 17 organisasi internasional yang melibatkan 23 negara (Maso'ed, M., 1989, 175), sementara di Asia Tenggara pada tenggang waktu yang relatif bersamaan hanya ada sedikitnya 4 yaitu SEATO, ASA, MAPHILINDO dan ASEAN pada tahun 1967, itu pun SEATO didirikan untuk mendukung kepentingan Amerika dalam mencegah pengaruh komunisme Uni Soviet di Asia Tenggara. Kemudian ASA dan MAPHILINDO hanya melibatkan 4 negara.

Perang-perang di kawasan Asia Tenggara, kendati tentu, tidak bersekala kecil namun efek destruksinya belum bisa

menanamkan pada benak masyarakat di Asia Tenggara rasa rindu yang kuat untuk berintegrasi. Masyarakat Asia Tenggara tidak sepaham dan semengerti masyarakat Eropa akan bahayanya perang. Indikator paling kasat mata barangkali fakta bahwa integrasi⁸ di Eropa jauh lebih solid dibanding di kawasan Melayu ini.

Political will para rezim berkuasa

Ada sejumlah faktor yang membuat mengapa para penguasa di Asia Tenggara berpotensi untuk mengganjal terciptanya Masyarakat Asean. Sejumlah karakter yang terdapat pada rezim-rezim nasional di Asia Tenggara, seperti: (1) *korup*, lihat Indonesia yang menempati urutan ke 5 di ASEAN dan 111 di dunia (versi *Transparency International Indonesia/ TII*); (2) berada pada fase *transisi demokrasi*, bahkan ada yang *otoriter* lihat saja Myanmar misalnya, karena *otoriter* maka; (3) memiliki prestasi yang buruk dalam penegakan HAM; (4) memiliki respon yang lemah terhadap aspirasi warga Negara, lihat kasus “*cicak Vs buaya*” di Indonesia, nampak betapa respon pemerintah pada

⁸ Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa kuat negara-negara dalam suatu kawasan terintegrasi adalah dengan melihat persentase nilai ekspor intra regional terhadap total ekspor regional tersebut. Semakin tinggi nilai eksportnya maka semakin kuat interdependensi antar negara dalam region itu, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase nilai ekspor intra regional terhadap total ekspor suatu regional, semakin lemah tingkat keterikatan antara negara-negara dalam kawasan itu. Pada tahun 1970, Masyarakat Eropa (ME) memiliki angka 50 untuk persentase nilai ekspor intra regional terhadap total ekspor regional Eropa, di tahun yang sama ASEAN hanya memiliki angka 21%. Sepuluh tahun kemudian ME masih unggul dibanding ASEAN, sementara ASEAN 18%, ME 56%. Pola yang sama juga berlaku untuk dekade berikutnya (1990) dengan perbandingan 51% untuk ME dan 19% untuk ASEAN, (Mansfield, E. D. & H. V. Milner., 1997, 172). Lima belas tahun kemudian (2005) tingkat perdagangan intra Uni Eropa mencapai 67,3% dari total perdagangan organisasi regional itu. Di tahun yang sama tingkat perdagangan intra ASEAN masih berada di bawah Eropa (Uni Eropa) dengan hanya 22,1% dari total perdagangan organisasi negara-negara Asia Tenggara itu. (Luhulima, C.P.F., 2008, 122).

desakan warga Negara sangat lemah, di Myanmar respon junta terhadap tekanan akar rumput di tingkat domestik dan aneka tekanan di tingkat regional dan bahkan global terkait dengan kasus Aung San Su Kyi pun tidak jauh beda, rezim bersifat konserfatif, menolak aneka perubahan yang mereduksi rasa nyaman para penguasa.

Karakter-karakter tersebut berimplikasi pada terciptanya rezim sejenis pada level regional Asia Tenggara. Karakter konserfatif dan anti dialog dengan masyarakat pun mengkristal. Permisalan paling kasat mata yang dapat di tunjuk adalah sikap Filipina, Singapura, Burma, Kamboja, dan Laos yang telah menunjuk sendiri perwakilan masyarakat sipil dalam forum dialog dengan 10 pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke 15 di Hun Hin (2009). Peristiwa tersebut mengindikasikan ketidakrelaan para pemimpin ASEAN untuk secara terbuka berdialog seara seimbang dengan warga Negara. Rezim Asia Tenggara telah menyadari adanya gerakan arus bawah yang mengusik kekuasaan mereka.

Indikator lain yang menunjukkan betapa rezim-rezim politik domestik telah mentransformasikan diri secara kolektif menjadi rezim regional yaitu prinsip non-interfensi yang sangat diagung-agungkan oleh Negara-negara di kawasan ini. Hemat penulis prinsip tersebut didesain sebagai metode untuk melanggengkan rezim-rezim politik domestik dari aneka gangguan campur tangan asing.

Polarisasi inilah yang menyulitkan ASEAN mentransformasikan diri dari *satate oriented* menuju *people oriented*, sehingga rasanya impian "Komunitas ASEAN" semakin jauh panggang daripada api. Singkatnya, aneka pernyataan, program, rencana untuk menggapai masyarakat ASEAN menjadi kehilangan relevansi dengan ranah inderawi terutama justru disebabkan oleh ketiadaan kemauan politik para pemimpin serta rezim-rezim doestik yang bercokol di Asia Tenggara.

Kesimpulan dan preskripsi

Komunitas regional tidak hanya membutuhkan pra kondisi maupun seting yang memungkinkan komunitas terbangun dengan solid, *political will* pemegang kebijakan Negara-negara Asia Tenggara memiliki peran kunci dalam hal ini. Seberapa solid suatu komunitas regional sangat ditentukan oleh: seting masyarakat dengan aneka karakternya; seting geografis dengan beragam variannya; maupun seting sejarah dengan bermacam pernik perniknya, namun demikian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa aneka potensi tersebut belumlah cukup untuk memicu terciptanya suatu komunitas pada tingkat regional. Masih ada faktor lain yang menempati peran kunci, yaitu: *political will* rezim-rezim berkuasa.

Melihat kemungkinan terwujudnya secara solid komunitas ASEAN 2020 apalagi 2015, dari perspektif seting-seting tersebut, nampaknya sangat sulit bagi ASEAN untuk mencapainya. Langkah paling mungkin untuk mengawali transformasi menuju komunitas ASEAN yang solid adalah meyakinkan—kepada para pemegang otoritas dan warga negara di Asia Tenggara—betapa komunitas regional akan membawa aneka keuntungan tidak hanya bagi Negara-negara Asia Tenggara namun lebih jauh adalah bagi masyarakat raya Asia Tenggara, baik dalam ekonomi, politik, HAM, lingkungan teknologi serta masih banyak lagi beragam kemungkinan yang dapat dicapai melalui metode “komunitas regional”.

Referensi

- Cipto, B. (2003). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global: dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Luhulima, CPF (2008). *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*. Jakarta: Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI.
- Mansfield, E. D. & H. V. Milner. (1997). *The Political Economy of Regionalism*. New York: Columbia University Press.
- Mas'oed, M.(1989). *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada.
- Smith, M. K. (2001) 'Community' in *the encyclopedia of informal education*,
<http://www.infed.org/community/community.htm>.,
diakses pada Senin 2 November 2009, pukul 13:05 WIB.

BAB 6

OPEN REGIONALISM MEMPERCEPAT
PERDAGANGAN MULTILATERALISME, BENARKAH?

Secara sederhana regionalisme dapat dipahami sebagai kerjasama ekonomi di antara sekelompok negara yang secara geografis berdekatan. Definisi ini diadopsi dari argumentasi Oatley (2004) yang menulis: *A Regional trade arrangement (RTA) is a trade agreement between two or more countries, usually located in the same region of the world, in which each country offers preferential market access to the other* (Oatley, T., 2004, 35).

Selanjutnya regionalisme harus bersinggungan dengan multilateralisme⁹ di tingkat global. *Open regionalism* pun menjadi strategi bagi regionalisme untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang melingkupinya itu. Selanjutnya apakah *open regionalism* merupakan tahap yang akan meleburkan regionalisme ke dalam multilateralisme ataukah hanya sebatas variasi tak bermakna yang tidak akan mengubah posisi regionalisme dalam tetap berhadapan dengan multilateralisme masih menjadi perdebatan sengit.

Secara khusus tulisan ini bermaksud membahas dua hal: (1) arti dari konsep *open regionalism* serta aneka kemungkinannya sebagai mediator persetujuan antara regionalisme dengan multilateralisme; dan ke-(2) dinamika

⁹ Multilateralisme bisa dimaknai sebagai transaksi perdagangan yang terjadi di antara banyak negara bangsa melalui banyak jalur, baik pemerintah maupun privat, tanpa ada pengkhususan atau pengecualian apapun untuk setiap negara. Contoh paling mudah disebut adalah perdagangan yang terjadi di bawah rezim WTO. Lebih spesifik, David K. Linnan menerangkan, konsep Perdagangan Bebas Multilateral Melalui Organisasi Perdagangan Dunia, didasarkan pada pasal 1 dalam konsep GATT/ WTO “negara-negara yang paling disukai” (*most favored nations clause* atau *MFN*) di mana pengurangan tarif atau pemberian keuntungan yang serupa diberikan pada satu anggota GATT/ WTO harus diberikan pula untuk semua anggota.

terbentuknya regionalisme Uni Eropa serta implikasinya terhadap proses integrasi ekonomi global.

Mendefinisikan *open regionalism*

Open regionalism menarik bukan hanya karena menjadi tren, namun juga karena implikasinya yang begitu besar terhadap dinamika ekonomi politik ditingkat domestik, regional maupun global. Mendefinisikan konsep *open regionalism* tak dapat dilepaskan dari konteksnya dan salah satu konteks pentingnya adalah persetujuan antara regionalisme dengan multilateralisme.

Regionalisme maupun multilateralisme sejatinya merupakan dua strategi yang dikembangkan oleh negara-negara yang secara kepentingan ekonomi berbeda. Bagi sebagian negara yang memilih strategi regionalisme, para pembuat kebijakannya berpresepsi, bahwa multilateralisme merupakan ancaman. Negara-negara ini merasa perlu memproteksi diri mereka (sebagai kelompok negara) dari ancaman multilateralisme, sehingga regionalisme dijadikan sebagai “benteng”.

Regionalisme dipilih oleh sekelompok negara sedikitnya karena tiga alasan, (1) motif ekonomi; (2) ikatan sejarah, sosio kultur dan kemiripan ras; dan (3) rasa aman bertransaksi dengan negara-negara yang secara kemampuan ekonomi relatif sama dan secara geografis berdekatan.

Sementara multilateralisme juga bermotif ekonomi namun dipilih oleh negara yang secara ekonomi relatif kuat. Di mata negara-negara dengan strategi multilateralisme, regionalisme merupakan penghambat dan sangat merepotkan.

Regionalisme sejatinya merupakan gabungan dari liberalisme dan merkantilisme. Dari sisi internal suatu regionalisme menerapkan kebijakan perdagangan liberal dimana semua hambatan perdagangan di antara negara anggota dihapus, sementara dari sisi eksternal regionalisme menerapkan

kebijakan proteksionis. Sisi merkantilis dari regionalisme inilah yang tidak disukai oleh para pendukung pasar bebas.

Para pemikir liberal pendukung multilateralisme berkeyakinan bahwa suatu regionalisme akan memancing munculnya regionalisme tandingan di tempat lain, sehingga implikasinya bila regionalisme tidak dihentikan maka akan membawa efek “domino” dengan berkembangnya regionalisme-regionalisme baru di dunia. Seting ekonomi global dengan format multi regionalisme, masih menurut pandangan liberalis, akan memperlebar kemungkinan konflik, bahkan konflik militer. Terhadap argumen ini kaum merkantilis membantahnya dengan mengajukan argumentasi bahwa blok-blok perdagangan itu sekedar mencerminkan distribusi kekayaan dan kekuasaan dunia yang ada (Mas’oed, M., 1998). Dalam konteks ini *open regionalism* menemukan momentumnya.

Terdapat sedikitnya dua indikator yang menunjukkan *open regionalism* beroperasi, yaitu: *pertama*, transaksi perdagangan antar negara yang berasal dari regional yang berbeda-beda seperti Indonesia dengan Jerman, Amerika dengan Singapura, India dengan Thailand dan sebagainya; dan *kedua* fenomena negara yang memiliki banyak keanggotaan organisasi regional seperti Indonesia yang selain anggota ASEAN juga anggota ASEAN plus 3, ASEM, EAS; Afganistan yang selain anggota SAARC juga anggota CAREC; Papua Nugini yang selain anggota APEC, juga anggota PIF dan lain sebagainya.

Berangkat dari dua indikator tersebut maka dapat dipetakan bahwa, *open regionalism* terjadi dalam sedikitnya tiga bentuk: (1) keterbukaan anggota, contoh Uni Eropa, yang juga membuka kemungkinan negara-negara di luar Eropa untuk bergabung; (2) keterbukaan transaksi perdagangan dengan negara di luar anggota, transaksi dagang antara negara-negara anggota Uni Eropa dengan Indonesia menjadi contoh yang mudah diingat; dan ke (3) hubungan antar regional (*Inter-regional*

relations), misalnya ASEM, kerjasama yang telah melibatkan dua organisasi regional.

Sejalan dengan argumentasi tersebut, APEC tengah mengembangkan konsep *open regionalism* nya sendiri. Sedikitnya terdapat lima pemahaman mengenai *open regionalism* versi OPEC, yaitu: *pertama*, keanggotaan terbuka, dalam arti negara manapun yang memiliki kemauan untuk mentaati aturan yang telah disepakati APEC dan mau menjunjung tinggi prinsip-prinsipnya akan diterima sebagai bagian dari regionalisme tersebut; *kedua*, *Unconditional Most-Favored-Nation*, yakni APEC akan memberi perlakuan yang tidak bersyarat bagi semua mitra dagangnya; *ketiga*, *Conditional Most-Favored-Nation*, yaitu APEC akan memberikan penawaran kepada negara bukan anggota (*non member state*) untuk mereduksi *barriers* (kebijakan pemerintah mengenai kuota, tarif, dan *tax*); *keempat*, *global liberalization*, yang merupakan kelanjutan dari praktik liberalisasi unilateral dan multilateral yang sudah ada di WTO; dan *kelima*, fasilitasi perdagangan yaitu reformasi *non tariff* dan *non border* serta pengakuan terhadap standar produk (Bergsten, C.F., 2007, 4-6).

Arvind Panagariya, lebih jauh, menyarikan definisi *open regionalism* dari tulisan Fred Bergsten tersebut. Secara lebih ringkas, beliau menulis:

This definition offers three criteria for open regionalism: (i) open membership with positif and curagement to non-members to joint; (ii) consistency with GATT article XXIV; and (iii) freedom to member countries to liberalis further unilaterali or with non-members on a reciprocal basis (Panagariya, A., 1999, 502).

Sehingga secara lebih longgar *open regionalism* dapat dipahami sebagai upaya membuka diri yang dilakukan oleh suatu organisasi regional dalam hal keanggotaan dan transaksi perdagangan dengan berbagai aktor yang berasal dari luar organisasi regional tersebut.

Open regionalism: dialog Regionalisme-Multilateralisme?

Apakah *open regionalism* menjadi tahap evolusi regionalisme menuju multilateralisme ataukah hanya sekedar variasi yang tidak membawa implikasi apapun bagi meleburnya regionalisme ke dalam multilateralisme di tingkat yang lebih luas, masih menjadi perdebatan yang panjang. Keyakinan, *open regionalism* menjadi mediator antar regionalisme menuju multilateralisme didukung oleh sedikitnya lima alasan.

Pertama, *open regionalism* dengan aneka bentuknya akan berimplikasi pada munculnya pola *spillover*. *Trans-regional relations* yang semula terbatas pada kerjasama-kerjasama tertentu akan melimpah ke bidang-bidang lainnya, sehingga transaksi antar regional akan berpola *complex interdependence*. Pada tahap ini maka multilateralisme telah muncul dan menggantikan regionalisme; *kedua*, *open regionalism* dalam bentuk keanggotaan akan berdampak pada banyaknya negara-negara yang memiliki banyak keanggotaan regional. Malaysia misalnya, selain anggota ASEAN juga menjadi anggota ASEAM, ASEAN *plus three* dan lain sebagainya. Dalam konteks ini maka multilateralisme telah muncul dalam bentuk multi keanggotaan suatu negara dalam banyak organisasi regional.

Argumen *ketiga*, mendasarkan pemikirannya pada dialektika sejarah. Menurut argumen ini multilateralisme di tingkat global merupakan keniscayaan sejarah. Pada akhirnya regionalisme-regionalisme di dunia akan melebur dalam multilateralisme besar di tingkat global. *Open regionalism* merupakan fase regional menuju multilateral; *ke empat*, regionalisme hakikatnya merupakan instrumen negara, ketika negara tidak lagi diuntungkan oleh regionalisme maka dengan enak saja negara akan keluar. Inggris misalnya kendati anggota Uni Eropa namun enggan menggunakan Euro, saat inilah maka kemungkinan multilateralisme akan terbuka; dan *kelima*, regionalisme tetap akan eksis sejauh memenuhi kepentingan

para anggotanya, bila tidak maka bubar dan terbuka lebar kesempatan bagi lahirnya multilateralisme.

Sementara di sisi yang berseberangan, justru beranggapan *open regionalism* tidak akan pernah menjembatani regionalisme dan multilateralisme. Sejumlah argumen berikut menjadi alasan. *Pertama, spillover* antar region, tak semudah *spillover* ditingkat intra region. Aneka benturan kepentingan dalam suatu regional akan terjadi dan menghambat *spillover* ditingkat global; *kedua*, multi keanggotaan suatu negara dalam banyak regionalisme tidak secara otomatis berimplikasi pada multilateralisme mengingat kuatnya komitmen intra regional acapkali tetap memperkecil kemungkinan tersebut; *ketiga* multilateralisme bukanlah keniscayaan sejarah, sejarah tidak berjalan linier namun sekedar mengulangi hal yang sama dalam bentuk yang berbeda. Pilihan untuk *open* atau *close* suatu regionalisme menjadi sangat ditentukan oleh kepentingan negara dominan dalam suatu regionalisme; *keempat*, “nasionalisme” regional akan membuat *open regionalism* dilakukan sejauh menguntungkan negara anggota, bila tidak, derajat keterbukaan akan dikurangi misalnya pro-kontra keanggotaan Turki di UE; *kelima* regionalisme tidak akan mudah bubar hanya karena tidak lagi memenuhi hajat kepentingan nasional anggotanya, karena ketika itu terjadi maka anggota akan mencari alasan lain untuk tetap mempertahankan regionalisme, contoh ASEAN; dan *keenam* regionalisme sejatinya upaya memproteksi diri dari ancaman multilateralisme, sehingga *open regionalism* hanya dipilih ketika multilateralisme di tingkat global melemah.

Kendati terdapat sejumlah alasan baik yang pro maupun kontra, hemat penulis, nampaknya akan sangat sulit—bila bukan mustahil—*open regionalism* akan mengarah pada evolusi regionalisme menuju multilateralisme, bagaimanapun negara maupun para pelaku ekonomi akan memilih multilateral atau *close regionalisme* menurut kepentingan mereka.

Implikasi Uni Eropa terhadap integrasi ekonomi global

Perang dunia II, sedikitnya berimplikasi pada dua hal yang selanjutnya menjadi konteks penting munculnya embrio Uni Eropa (selanjutnya disingkat UE), dua hal itu adalah: *pertama* munculnya dua *super power* (Amerika dan Uni Soviet) dan perang dingin; serta (2) krisis ekonomi Eropa dan kerusakan luar biasa infrastruktur di Eropa. Dalam seting global yang berpola bipolar dan seting kawasan berupa krisis ekonomi. Eropa dihadapkan pada upaya kedua *super power* yang berlomba-lomba menguasainya. Kendati, tentunya, memilih salah satu *super power* bertentangan dengan idealisme bangsa Eropa untuk menjadi kekuatan global, nampaknya krisis ekonomi yang begitu memilukan membuat bangsa-bangsa Eropa dengan sangat terpaksa menerima bantuan *Marshal Plan* Amerika. Konon paket bantuan untuk pemulihan Eropa itu merupakan paket bantuan terbesar sepanjang sejarah.

Marshal plan tentu sarat dengan kepentingan Amerika. Tidak hanya secara fisik Eropa Barat akan menjadi benteng alam maupun ideologi bagi “paman sam” dari “serangan” Uni Soviet, namun juga bangkitnya bangsa-bangsa di Eropa kontan akan menjadi pasar bagi aneka produk Amerika. Dalam perjalanannya nampaknya bangsa Eropa terlalu pandai bila hanya dijadikan instrumen politik Amerika. Mereka dengan cepat menyadari kepentingan Amerika di Eropa dan secara kreatif justru mentransformasikan bantuan *paman sam* itu untuk meletakkan pondasi-pondasi regionalisme di Eropa.

Komunitas batu bara dan baja Eropa/ *European Coal and Steel Community* (ECSC) yang dipelopori Jerman, Prancis, Itali dan 3 negara Benlux menjadi pijakan bagi perjalanan panjang regionalisme di Eropa yang suatu saat nanti akan melahirkan UE. Dalam rentang waktu 42 tahun sejak ECSC didirikan (1951), regionalisme di Eropa tengah menyentuh titik tertinggi, yang belum pernah dicapai sebelumnya yaitu UE (1992). Lebih dari

sekedar regionalisme, UE bahkan telah mentransformasikan diri ke dalam bentuk *supra state*. Sebagaimana suatu negara, UE memiliki lembaga legislatif yang diperankan oleh Parlemen Eropa, ia juga mempunyai lembaga eksekutif yang dijalankan oleh Komisi Eropa, memiliki *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) sebagai institusi yang mendesain kebijakan ke luar kawasan (seanalog dengan kebijakan luar negeri dalam suatu negara), serta yang lebih unik lagi sebagai sebuah kawasan adalah adanya mata uang tunggal layaknya sebuah negara, *Euro*.

Dalam proses perjalanannya menuju UE, regionalisme di Eropa mengalami perluasan dan pendalaman. Penambahan anggota dari tahun-ke tahun merupakan indikator betapa UE mengalami perluasan. Sementara pendalaman integrasi nampak pada sejumlah traktat. Lihat tabel 6. 1: Perluasan anggota regionalisme Eropa dari tahun 1952-2007; dan tabel. 6. 2: Daftar traktat-traktat regionalisme Eropa (1952-2000).

Implikasi terhadap integrasi ekonomi global

Secara teoritik semakin kuat integrasi ekonomi di tingkat regional maka akan berpengaruh pada semakin lemahnya integrasi ekonomi di tingkat global, sebagaimana pula sebaliknya semakin lemah integrasi ekonomi di level regional, akan semakin kuat integrasi ekonomi di tingkat global. Bagaimanapun juga munculnya regionalisme sebagai tren dunia akhir-akhir ini akan membuat ekonomi global semakin terfragmentasi ke dalam blok-blok ekonomi yang menyebar.

Ada dua poin yang dapat ditunjuk pada fenomena UE terkait dengan pengaruhnya terhadap integrasi di tingkat global. *Pertama* dari sisi kohesifitas integrasi Eropa semakin kuat. Indikasi ini nampak pada kecenderungan ambisius bangsa Eropa untuk mentransformasikan UE ke arah *supra state*, yang artinya hambatan transaksi perdagangan dengan aktor ekonomi dari luar Eropa akan semakin ketat; dan *kedua* UE merupakan kawasan yang memiliki kemampuan ekonomi yang sangat besar.

Pada tahun 2010 UE menyumbang 19% GDP dunia (Purbasari, D.P., 2011). Dengan hambatan yang semakin kuat dan tingkat perekonomian yang mengagumkan UE tak pelak memiliki implikasi terhadap melemahnya kohesifitas integrasi ekonomi di tingkat global.

Referensi

- Bergsten, C. Fred. (2007). *Open Regionalisme*. Working Paper 97-3. Institute for International Economics.
- Mas'ood, Muhtar. (1998). "Perdagangan dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional". *Bahan Kuliah Ekonomi Politik Global*. Yogyakarta: Ilmu Hubungan Internasional-FISIPOL-UGM.
- Oatley, Thomas. 2004. *International Political economy: Interest and Institutions in the Global Economy*. New York: Pearson Longman.
- Panagariya, Arvind. "The Regionalism Debate: an Overview". *World Economy* 22/ 4, 1999.
- Purbasari, D.P. (2011). *Belajar dari Krisis US, Eropa, dan Ekonomi BRICS*. (makalah dipresentasikan dalam *Short Course on International Political Economy* Fisipol UGM, 22 November 2011).

BAGIAN KE EMPAT
ISU *FAIR TRADE*

BAB 7

FAIR TRADE DALAM PETA PERDEBATAN PERSPEKTIF ARUS UTAMA EPI

Di tengah dinamika perdagangan global, pola konflik dan eksploitasi sangat sulit dihindari. Inilah titik tolak bagi gagasan bernama *fair trade*. Secara khusus tulisan ini bermaksud mendudukan gagasan *fair trade*¹⁰ dalam peta perdebatan tentang perdagangan yang diajukan oleh perspektif arus utama dalam studi Ekonomi Politik Internasional (Merkantilisme, Liberalisme dan Strukturalisme).

Perspektif arus utama EPI

Tercatat dalam 2 dekade terakhir misalnya, nilai ekspor perdagangan dunia naik hingga mencapai angka rata-rata di atas 8 persen (Akyuz, Y., 2003, 6). Oleh para analis pendukung pasar bebas fakta angka-angka itu dimaknai sebagai integrasi ekonomi dan interdependensi yang semakin menguat.

Sementara fakta lain yang berbeda, nampak betapa regionalisme muncul di sana-sini dan merkantilisme mengungkapkan diri dengan berbagai bentuknya. Sisi lain dari fenomena ekonomi politik global ini di pahami sebagai kembalinya merkantilisme (*new mercantilism*). Fenomena tersebut menyuguhkan, betapa pertarungan antar perspektif tidak hanya berlangsung di dalam lingkaran pikiran semata, namun juga merambah dalam tataran praktis.

¹⁰Organisasi *fair trade* di seluruh dunia menyepakati definisi *fair trade*, sebagai sebuah kemitraan dagang berdasarkan dialog, transparansi dan saling menghormati untuk mencari keadilan yang lebih luas dalam perdagangan internasional. Membantu pengembangan berkelanjutan dengan menawarkan persyaratan perdagangan yang lebih baik, menyelamatkan hak-hak produsen dan pekerja yang terpinggirkan (tidak diuntungkan) khususnya di negara selatan (APIKRI No 1/ th. I.).

Dinamika perdagangan internasional diterjemahkan secara beragam oleh aneka perspektif berbasis ideologi yang tidak hanya mendominasi tafsir terhadap fakta perdagangan, namun lebih dari itu, menjadi acuan para pembuat kebijakan, baik yang berada di jajaran birokrasi negara, staf di perusahaan-perusahaan, para aktivis gerakan anti globalisasi hingga masyarakat sipil baik di tingkat domestik maupun global.

Gambar yang muncul dari cerita perdagangan internasional oleh seorang Merkantilis adalah pertarungan kepentingan ekonomi negara-negara yang terlibat dalam aktivitas dagang. Pola hubungan di antara para pemain utama ekonomi global itu, dipahami oleh ilmuwan Merkantilis sebagai *zero sum game*. Ketika suatu negara memacu produksi barang tertentu yang berimplikasi pada naiknya kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka di luar sana ada negara yang merugi akibat tambahan produksi itu, demikian sebaliknya. Pola inilah yang oleh para analis Liberal diyakini sebagai berkorelasi positif dengan konflik internasional. Kedua perang dunia yang bermuara di Eropa oleh para pemikir Liberal diyakini sebagai kelanjutan dari kebijakan Merkantilisme ekstrem.

Sebaliknya sebagai preskripsi, mereka para ilmuwan Liberal, justru membangun argumentasi secara terbalik dari kontruksi pikiran analis Merkantilis. Menurut mereka pasar yang tidak diintervensi negara akan menciptakan hubungan tali temali di antara para pelaku ekonomi, yang implikasinya adalah semakin tereduksinya potensi konflik. Untuk meyakinkan argumentasi tersebut, Meredith (2010) menulis:

"Berita yang menggembirakan adalah bahwa kesalingtergantungan ekonomi internasional yang sedang tumbuh ini adalah sedikit mirip dengan pencegahan nuklir: Negara-negara yang telah mencapai ikatan perdagangan dan finansial mempunyai kepentingan untuk terus memelihara hubungan ekonomi dari pada memicu lingkaran ledakan-ledakan finansial yang dapat dengan cepat meningkat keseluruh dunia." (Meredith, 2010, 218)

Selain terkikisnya kemungkinan konflik, lebih jauh, pemikir Liberal meyakini pola hubungan antar bangsa yang berbasis pasar bebas bersifat *positive sum game*, dimana keuntungan yang didapat suatu negara tidak berarti kerugian bagi negara lain.

Di sisi lain, kaum Strukturalis/ Radikal justru memiliki narasi yang sangat berbeda terhadap fakta perdagangan yang berbasis ide pasar bebas. Mereka, para ilmuwan Strukturalis, memiliki banyak sekali bukti-bukti empiris betapa fakta perdagangan internasional berpola eksploitatif. Berbagai riset yang mereka lakukan menginformasikan pada kita betapa negara-negara yang berada di belahan bumi bagian utara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding negara-negara di bagian selatan.

Demikian cerita tentang perdagangan yang dinarasikan oleh tiga golongan ilmuwan yang berada dalam tiga arus utama studi EPI. Kendati dalam ketiga cara memahami fenomena perdagangan internasional tersebut terdapat kebenaran-kebenaran yang tidak dapat disangkal, namun sulit rasanya menutup mata dari aneka keterbatasan yang juga terkandung dalam ketiga analisis pikiran utama dalam studi EPI. Sulit dipungkiri betapapun Merkantilisme sangat rasional dan mantap dengan berbagai anjurannya untuk mendapat keuntungan melalui kebijakan proteksi, namun sulit mengandaikan tatanan dunia damai dengan pola perdagangan *zero sum game* tersebut.

Demikian pula betapapun Liberalisme dengan rekomendasi pasar bebasnya harus diakui berprestasi dalam mengakumulasi kekayaan dan kemakmuran, namun sulit dipungkiri dari "rahim" kapitalisme lahir kesenjangan yang semakin lebar baik di tingkat domestik maupun internasional. Hal serupa juga terjadi dalam logika Strukturalis, betapapun para pemikir ini sangat pandai dalam memetakan permasalahan

eksploitasi dan ketimpangan, namun anjurannya untuk revolusi sistem menjadi sangat utopis dan nyaris tidak dapat dilakukan.

***Fair Trade* dalam perdebatan perspektif arus utama**

Di tengah konstalasi pemikiran dan fakta perdagangan internasional itu, muncul sekelompok ilmuwan kreatif yang memiliki perspektif optimis terhadap fakta perdagangan yang mereka sendiri akui sekarang berpola konfliktual dan eksploitatif namun dengan sedikit polesan di sana sini dapat disulap menjadi perdagangan yang *fair*. Mereka yang berada dalam barisan pemikir reformis ini diantaranya adalah ul Haq (1976), Raul Prebisch (1971) dan Johan Galtung (1971)¹¹.

Serangkain asumsi dasar yang mendasari para pemikir Reformis ini diantaranya adalah *pertama*, mereka mengakui eksistensi peran negara dan aktor-aktor privat baik aneka kelompok kepentingan maupun para pelaku ekonomi swasta (Mas'ood, M., 2008, 34). Pola hubungan di antara mereka sangat kreatif tidak ada yang paling menentukan namun secara bersamaan berjaln berkelindan dan saling mempengaruhi dalam memproduksi iklim perdagangan. Anggapan ini sangat bertolak belakang dengan keyakinan tiga perspektif arus utama seperti yang diuraikan sebelumnya. Merkantilisme meyakini dominasi peran negara¹², liberalisme sebaliknya mengakui eksistensi kuat para pelaku ekonomi privat sementara strukturalisme mempercayai kekuatan kelas sosial.

Kedua, para Reformis meyakini sekaligus menganjurkan bahwa tujuan kegiatan ekonomi politik (termasuk di dalamnya perdagangan) sejatinya merupakan maksimalisasi kesejahteraan

¹¹Pandangan kaum reformis yang ditulis dalam bagian ini disadur dari tulisan Muhtar Mas'ood (2003, 55-65), dalam tulisan tersebut beliau menempatkan ul Haq (1976), Prebisch (1971) dan Galtung (1971) ke dalam kategori para pemikir berhaluan reformis. Hal: 60.

¹²lebih jauh para pemikir merkantilis meyakini pertumbuhan ekonomi akan terjadi ketika terdapat stabilitas politik yang mantap yang akan terwujud hanya dengan intervensi negara (Yustika, A., 2009, 173).

global (Mas'ood, M., 2008, 34), ini berbeda dengan 3 perspektif arus utama EPI. Merkantilis mempercayai dan mengarahkan tujuan perdagangan internasional adalah surplus, sementara Strukturalis menganggap kesejahteraan kelas. *Ketiga*, Reformis, kendati mengakui bahwa perdagangan internasional bersifat konfliktual (seperti keyakinan Merkantilis) dan merugikan si lemah (seperti anggapan Strukturalis), namun mereka berkeyakinan itu bisa diperbaiki (Mas'ood, M., 2008, 34).

Sementara, *keempat*, peran negara, menurut kaum Reformis, bersifat primer dalam memperjuangkan kelompok negara-negara lemah dalam forum-forum internasional (Mas'ood, M., 2008, 35). Pandangan ini mirip dengan argumentasi Merkantilis dan Strukturalis, hanya saja bedanya Merkantilis beranggapan peran pokok negara ditujukan untuk membela kepentingan ekonomi nasionalnya, sementara Strukturalis, meyakini peran kunci negara justru sebagai pejamin dan pelindung kepentingan kelas borjuis, namun lain dengan pandangan Liberal yang meyakini negara berperan sekunder, hanya menjamin keberlangsungan pasar bebas.

Kelima, dalam konteks memahami hubungan negara dan pasar para pemikir Reformis meyakini keduanya bersifat saling mempengaruhi (Mas'ood, M., 2008, 34), ini sangat berbeda dengan keyakinan ketiga cara pandang dominan. Kaum Strukturalis beranggapan pasarlah yang menentukan negara, karena negara sejatinya instrumen bagi kelas borjuis sebagai pelaku dalam perdagangan. Aneka kebijakan negara sejatinya dituntun, diarahkan dan diabdikan untuk kepentingan kelas borjuasi. Pemikir Merkantilis sebaliknya, justru mempercayai negaralah yang menentukan pasar¹³. Negara betapapun eksis bersama aktor-aktor lain non negara yang semakin menjamur

¹³Seorang merkantilis terkemuka Robert Gilpin dan Jean Millis menulis: politik internasional dan hubungan-hubungan politik secara signifikan mempengaruhi bentuk alami dan dinamika ekonomi internasional (Gilpin, R. , 2000, 391).

namun porsinya dalam menentukan arah pasar tidak berkurang dengan semakin banyaknya para pelaku privat, karena negaralah satu-satunya aktor yang memiliki kewenangan legal untuk menggunakan kekuasaan. Sementara Liberalisme beranggapan pasar seharusnya yang menentukan negara. Argumentasi para penganut Liberalisme berangkat dari landasan filosofi bahwa negara dibuat sejatinya untuk menjamin kebebasan individu, sehingga aktivitas pasar (yang dimainkan dan di ramaikan aktor-aktor privat) lebih berhak mengontrol negara dari pada sebaliknya.

Keenam, terhadap kemungkinan perubahan, para Reformis percaya perubahan bisa dituntun dan diarahkan secara berlahan dan bertahap ke reformasi struktur secara damai (Mas'ood, M., 2008, 34). Sementara kaum Strukturalis meyakini perubahan berpola disequilibrium, sebaliknya pandangan Liberal justru berkeyakinan perubahan menuju ke arah ekuilibrium dinamik, sementara Merkantilisme beranggapan perubahan bergantung pada konstalasi dan distribusi power (Mas'ood, M., 2008, 34).

Ketujuh, kaum Reformis menganjurkan untuk memanfaatkan organisasi internasional untuk strategi "*collective self reliance*" dan "*collective bargaining*" (Mas'ood, M., 2008, 36). Di sisi lain Merkantilisme mewajibkan negara untuk mengintervensi pasar demi menguatkan ekonomi nasional, pemikir Liberalisme mengajari kita agar memanfaatkan organisasi internasional namun membebaskan pasar dari intervensi. Sementara para pemikir dalam jajaran Strukturalis mendoktrinkan semangat keluar dari sistem kapitalisme internasional dan menerapkan strategi *autarky*.

Refleksi

Sebagaimana *free trade*, *fair trade* sejatinya hanyalah model, karena keduanya model maka mustahil menemukannya beroperasi secara utuh dalam ranah empiris. Hemat penulis ide

fair trade sejatinya lahir dari pikiran para pemikir Reformis yang jika diruntut ke atas akan sampai pada Konstruktivisme dan akhirnya Posmodernisme. Mereka para pemikir Konstruktivisme menganjurkan agar para pelaku hubungan internasional memperluas pemahaman cara-cara aktor internasional membangun gambaran-gambaran tentang hubungan internasional untuk menjelaskan keterbatasan dari berbagai interpretasi teoritis serta kebijakan yang diusungnya (Jemadu, A., 2008, 17) termasuk mengkritisi perspektif *mainstream* yang telah mapan dalam EPI.

Kritik para ilmuwan Rasionalisme terhadap bermacam buah pikir Posmo adalah utopisme ekstrem yang nyaris tidak dapat terjadi dalam ranah empiris. Ini adalah tantangan bagi parapemikir Reformis studi EPI. Pasar sebagai tempat bertemunya para pelaku ekonomi (produsen, konsumen dan distributor) sejatinya tidak bekerja sama persis seperti asumsi-asumsi para ilmuwan Liberal, Struktural maupun Merkantilis. Muhtar Mas'ood (1990, 94) dengan *apik* menulis:

Tidak ada analisis serius yang mengharapkan bahwa hubungan ekonomi dan politik global yang serumit perdagangan itu akan bisa diselesaikan dengan cara yang sepenuhnya konsisten dengan satu aliran pemikiran saja, terutama dalam suatu zaman dimana bahkan negara yang paling kuat di duniapun semakin tidak mampu memobilisasikan dukungan domestik dan internasional terhadap aliran pemikiran yang sejak lama di anjur-anjurkannya.

Justru karena itulah maka menurut penulis gagasan *fair trade* memiliki potensi yang besar sebagai panduan yang akan menuntun perdagangan global ke arah yang lebih beradab. Secara teknis ide *fair trade* dapat diterjemahkan dalam banyak cara. Aktor-aktor seperti kelompok epistemik, media massa, NGO-NGO yang bergerak dalam bidang HAM dan demokrasi nampaknya memiliki ruang yang luas untuk menerapkan gagasan ini. Seiring dengan itu masyarakat sipil mejadi basis utama yang harus dipersiapkan untuk memagari pikiran *fair*

trade agar terus terjaga dan dapat menjadi praktik yang mempola dalam kehidupan umat manusia.

Referensi

- Akyuz, Yilmaz (ed). 2003. *Developing Countries and World trade: Performance and Prospects*. Malaysia: TWN.
- Gilpin, Robert dan Jean Millis Gilpin. [terj: Haris Munandar dan Dudy Priatna. 2000]. *Tantangan Kapitalisme Global Ekonomi Dunia Abad ke-21*. Jakarta: Muria Kencana.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Perniagaan Berkeadilan, sebuah gerakan global*, Buletin APIKRI, No.1 /th. I The Voice of Fair Trade. Hal: 2.
- Meredith, Robyn. 2010. *Menjadi Raksasa Dunia: fenomena kebangkitan India dan Cina yang luar biasa dan pengaruhnya terhadap kita*. Bandung: Nuansa.
- Maso'ed, Muhtar. 2003. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 1990. *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM.
- _____. 1998. *Perdagangan dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional*(Bahan Kuliah). Yogyakarta: FISIPOL. UGM.
- Yustika, Ahmad Erni. 2009. *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisa Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB 8

TRANSFORMASI *FREE TRADE* MENUJU *FAIR TRADE*, MUNGKINKAH?

Berbagai argumentasi dibangun guna membungkam fakta empirik kemiskinan yang terbukti telak merupakan produk dari pasar bebas (*free trade*)¹⁴. Tidak hanya kemiskinan yang semakin menggila, wajah ekonomi berbasis liberal semakin “bopeng” dengan aneka penemuan kerusakan lingkungan di banyak pelosok dunia. Banjir, kekeringan, kelaparan hingga gempa dan tsunami yang muncul sebagai akibat dari hilangnya keseimbangan alam karena eksploitasi besar-besaran perusahaan-perusahaan raksasa multinasional menjadi bukti tak terbantah betapa sistem ekonomi pasar bebas sangat tidak ramah dan tidak adil (*unfair*). Anehnya para pendukung pasar bebas tak pernah bosan untuk menghentikan aktivitas liberalisasi pasar hingga tulisan ini dibuat.

Konteks inilah yang pada perkembangannya mendorong sejumlah aktivis menawarkan cara baru perdagangan: *fair trade* (perdagangan yang adil)¹⁵ sebagai alternatif. Karena bertentangan dengan prinsip ekonomi, praktik *fair trade* berkembang sangat lambat, orang lebih memilih praktik dagang

¹⁴ Lihat misalnya data yang dipublikasikan *Bill and Melinda Gates Foundations* (Bill and Melinda Gates Foundations: *Savings Statistics*).

¹⁵ Oxfam mendefinisikan *fair trade* sebagai suatu gerakan internasional yang mencoba memberikan jaminan bahwa produsen di negara-negara miskin mendapat kontrak-kontrak yang adil (*fair deal*) yang mencakup harga yang pantas bagi produk-produk mereka, kontrak-kontrak pembelian jangka panjang, dukungan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, serta peningkatan produktivitas (Hadiwinata, B. S., 2004, 6). Sementara itu konsensus organisasi *fair trade* di seluruh dunia sebagaimana dikutip oleh buletin APIKRI No 1/ th. I, mendefinisikan:

"Fair trade adalah sebuah kemitraan dagang berdasarkan dialog, transparansi dan saling menghormati untuk mencari keadilan yang lebih luas dalam perdagangan internasional. Membantu pengembangan berkelanjutan dengan menawarkan persyaratan perdagangan yang lebih baik, menyelamatkan hak-hak produsen dan pekerja yang terpinggirkan (tidak diuntungkan) khususnya di negara selatan".

konvensional ala pasar bebas ketimbang jalan alternatif yang bersahabat tersebut. Secara khusus tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan: seberapa besar kemungkinan terjadi transformasi dari *free* menuju *fair trade* dapat terjadi?

Transformasi paradigma

Konsep paradigma Thomas Khun dapat menjelaskan gerak pertumbuhan ide dan praktik *fair trade* yang lambat. Khun sejatinya menggunakan konsep paradigma untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Hemat penulis, perkembangan *fair trade* sebagai gagasan dan praktik seanalogue dengan dinamika ilmu pengetahuan sehingga dapat diterangkan pula dengan konsep serupa.

Menurut Khun, pengetahuan pertama kali dipelajari oleh para ilmuwan secara tidak terpolakan. Mereka mengumpulkan data dari berbagai tempat dengan aneka caranya masing-masing. Dalam perkembangannya ketika pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan dari riset-riset para ilmuwan tersebut dikomunikasikan satu sama lain, maka akan terjadi perdebatan terkait pengetahuan tersebut di antara para ilmuwan. Hingga sampai pada suatu tahap di mana mereka “menyepakati” serangkaian landasan-landasan yang dianggap benar. Melalui landasan-landasan ini selanjutnya riset-riset dikonstruksi. Kesepakatan inilah yang oleh Khun disebut paradigma.

Kesepakatan-kesepakatan seperti, bagaimana pengetahuan seharusnya dikonstruksi?, apa yang menjadi sasaran penelitian?, serangkaian langkah teknis apa yang harus dilalui dalam riset?, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam riset?, dan berbagai nilai tertentu yang diyakini harus menjadi unsur dalam proses pembentukan ilmu serta berbagai kesepakatan-kesepakatan lain, menjadi dasar bagi terbentuknya paradigma.

Paradigma dalam ilmu pengetahuan tidaklah berwajah tunggal, namun sangat majemuk, terjadi persaingan yang ketat

di antara paradigma-paradigma tersebut. Dan terjadi pula upaya saling mendominasi. Paradigma yang memiliki banyak pengikut akan menjadi paradigma utama selama dapat mempertahankan dominasinya. Sementara paradigma yang memiliki sedikit pengikut bukan tidak mungkin akan hilang sama sekali ketika ditinggalkan para pengikutnya. Paradigma yang memiliki banyak pengikut, telah stabil dan relatif mapan oleh Khun dikategorikan disebut sebagai *normal science*. Pada perkembangannya paradigma yang mapan akan dihadapkan pada suatu peristiwa yang menantang kesahihannya, hingga pada akhirnya paradigma tersebut terbukti gagal dipertahankan keabsolutannya. Keadaan ini disebut *anomali*, yakni gagalnya paradigma dalam memberikan penyelesaian bagi masalah baru yang muncul.

Anomali selanjutnya membuka peluang bagi paradigma-paradigma lain untuk menampilkan diri. Dalam pertarungan antar paradigma tersebut, ada yang harus tersingkirkan hingga tersisah sedikit atau bahkan satu paradigma dominan. Satu hal yang penting adalah kemapanan suatu paradigma lebih ditentukan oleh *power* dari pada kesahihannya dalam menjawab persoalan. Boleh jadi suatu paradigma lebih sah dari yang lain namun karena basis kekuasaannya lemah maka tidak menjadi paradigma dominan. Sebaliknya boleh jadi ada paradigma yang sejatinya gagal merespon persoalan namun karena memiliki basis kekuasaan yang kuat maka ia menjadi paradigma yang mapan. Pandangan ini sejalan dengan alur pikiran para pemikir berhaluan kritis (Burchill, S., 2005, 137-159).

Dalam kerangka pemahaman seperti ini *fair trade* diletakan dalam konstalasi pertarungan antar paradigma perdagangan di mana *free trade* menjadi paradigma dominan dengan basis kekuasaan yang sangat kuat. Sementara di sisi yang berbeda *fair trade* merupakan paradigma pinggiran yang sedang diperjuangkan para penganutnya untuk menjadi paradigma utama.

Paradigma *fair trade*

Konteks ketimpangan ekonomi global bukan tanpa pengaruh terhadap aneka dimensi lainnya, inilah yang menjadi pemicu munculnya gagasan dan gerakan bernama *fair trade* pada tahun 1943 oleh para aktivisnya di Amerika Serikat dan Guatemala (Panzuri, A., 2011). Gerakan *fair trade* di Amerika didorong oleh *epistemic community*. Kepekaan yang tinggi terhadap praktik perdagangan yang tidak adil produk *free trade* yang terjadi di banyak negara di dunia mendorong mereka untuk menjadi agen propaganda *fair trade*. Sementara *women trafficking* telah menyulut gerakan berbasis keadilan di Guatemala dan menjadi salah satu tonggak penting bersejarah bagi perkembangan *fair trade* selanjutnya (Panzuri, A., 2011).

Di Belanda gerakan serupa dipicu oleh nasib buruh yang memilukan, sehingga memuncak pada munculnya gerakan partai buruh kala itu (Panzuri, A., 2011). Di negara-negara seperti India, Srilangka, Banglades, Pilipina hingga Indonesia pada dekade 70 an telah muncul pula gerakan serupa. Gerakan-gerakan tersebut tidaklah lahir secara parsial di masing-masing negara namun mereka menjalin hubungan dan mengorganisir diri di tingkat regional bahkan global.

Asia Fair Trade Forum (AFTF) misalnya, menjadi basis gerakan di tingkan regional. Sementara di tingkat nasional, di Indonesia, hingga setidaknya 2011 terdapat sedikitnya 20 an organisasi yang bergerak dalam arus *Fair Trade* yang tergabung dalam wadah besar *Forum Fair Trade Indonesia (FFTI)*.

Menuju paradigma *fair trade*

Dengan menggunakan model perkembangan ilmu Khun, dinamika perkembangan *fair trade* di antara kemajemukan paradigma perdagangan global yang didominasi secara telak oleh *free trade* dalam tulisan ini dipahami. Kendati gerakan *fair trade* sudah lama diperjuangkan, namun geliatnya sangat lemah. Di Indonesia saja misalnya walaupun sudah dimulai sejak tahun

70 an atau lebih dari 40 tahun yang lalu sejak tulisan ini dibuat namun hingga setidaknya tahun 2011 unit pelaku ekonomi resmi yang bergerak dalam *fair trade* hanya berjumlah 20 an yang tergabung dalam *Forum Fair Trade Indonesia*. Hal serupa juga terjadi pada gerakan *fair trade* di banyak negara lain. Kenapa gerakan *fair trade* sulit berkembang dan seberapa besar kemungkinan *fair trade* menjadi *mainstrame* dalam perdagangan global?

Dedy Permadi (2010, 101), merumuskan sedikitnya terdapat 4 faktor yang mendorong suatu ide menjadi ide utama, yaitu: (1) momentum; (2) aktor intelektual; (3) kekuatan politik dan (4) penerimaan masyarakat. Sementara saya terinspirasi oleh Dedy Permadi berpendapat bahwa faktor yang mendorong sebuah ide menjadi paradigma adalah: (1) Momentum, (2) *problem solving*, (3) agen propaganda; dan (4) basis kekuasaan. Dengan keempat faktor tersebut, menurut saya, *fair trade* akan melalui jalan panjang berliku.

Jalan panjang berliku

Ditinjau dari segi momentum, sejatinya telah terdapat banyak sekali momentum yang menunjukkan betapa *free trade* gagal dalam menyelesaikan aneka problematika ekonomi global. Contoh bagusnya adalah berbagai krisis global yang terjadi selama ini, seperti krisis finansial global 2008 yang dipicu oleh gagal bayar para nasabah perusahaan raksasa investasi properti, *Lehman Brothers*; krisis finansial di Asia 1997 yang dipicu oleh jatuhnya nilai *bath* di Thailand; serta berbagai krisis finansial lain serupa hingga depresi besar yang bersumber dari Amerika. Momentum yang menunjukkan kegagalan paradigma konservatif dominan sejatinya sudah cukup banyak, hanya saja kesempatan itu sering diabaikan oleh paradigma pinggiran untuk mengambil alih peran.

Kedua, dari sisi kemampuan memberikan solusi, maka *fair trade* terbukti cukup handal. *Fair trade* dalam banyak kasus

memberikan solusi yang sangat konkrit dan aplikatif terhadap aneka permasalahan ketidakadilan yang muncul dari praktik pasar bebas. Permisalan paling mudah ditunjuk adalah praktik *fair trade* yang telah dilakukan oleh Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI) di Yogyakarta. APIKRI telah melakukan banyak aktifitas sebagai mediator bagi para pengrajin lokal dengan *buyers* di luar negeri, pekerjaan yang nyaris mustahil dilakukan sendiri karena kuatnya para pemaian besar. Secara intens APIKRI juga menerapkan standar *fair trade* terhadap pengrajin-pengrajin yang memanfaatkan jasanya. Dari mulai pemilihan bahan baku produk, proses produksi hingga pemasaran. APIKRI dengan ketat melakukan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip *fair trade*. Para pengrajin pengguna jasa APIKRI misalnya, harus menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, mereka biasanya memilih limbah, kayu-kayu bekas, sampah yang berupa tempurung kelapa hingga daun-daun yang didapatkan dengan cara tidak merusak lingkungan. Dalam proses produksi, APIKRI juga memastikan agar karyawan diperlakukan secara manusiawi. Kesehatannya dan keselamatannya terjaga serta secara psikologi tidak tertekan. Dari sisi kemampuan memberikan solusi sejatinya *fair trade* tidak hanya aplikatif namun sudah terbukti.

Ketiga, memiliki agen propaganda, yaitu aktor, baik kelompok maupun individu, pemerintah maupun swasta, ilmuwan ataupun praktisi dengan aneka aktivitasnya untuk mempropagandakan nilai-nilai dan praktik *fair trade*. Agen-agen tersebut sejatinya sudah ada dalam gerakan *fair trade*, bahkan langkah-langkah mereka untuk mempromosikan ide dan praktik *fair trade* juga sudah dilakukan. Di antaranya yaitu: penyebaran brosur, presentasi, pembuatan label, pencetakan buletin hingga pameran produk (Mitra Bumi Indonesia, 2003 dalam Hadiwinata, S. B., 2004). Hanya saja satu hal yang perlu digaris bawahi, upaya tersebut masih tergolong lemah, bahkan sangat

lemah. Indikator yang dapat ditunjuk misalnya yaitu jumlah para pelaku usaha berbasis *fair trade* yang tergolong masih sangat sedikit.

Keempat, memiliki basis kekuasaan. Basis kekuasaan diperankan oleh pemerintah. Melalui berbagai program yang didisainnya, pemerintah yang mendukung cara-cara *fair trade* sebagai paradigma perdagangan akan menggunakan *power* untuk mendorong *fair trade* menjadi praktik dagang. Dilihat dari sisi ini, maka nyaris kekuasaan absen dari gerakan *fair trade* terutama di Indonesia. Lihat tabel 8. 1 Ringkasan Indikator Transformasi Paradigma.

Dari survai sederhana ini, dapat disimpulkan bahwa peluang transformasi dari *free trade* menuju *fair trade* sangat kecil. Basis kekuasaan menjadi masalah paling krusial yang dialami gerakan *fair trade*. Umumnya pemerintah kurang tertarik dengan metode perdagangan *fair trade*. Tidak hanya karena secara teknis sulit dilakukan, namun juga karena kecenderungan pemerintah berfikir instan.

Langkah paling mungkin

Ditinjau dari empat barometer tersebut, maka masalah mendasar *fair trade* ada dua, yaitu, terbatasnya agen propaganda dan lemahnya basis kekuasaan. Dua masalah tersebut seharusnya dijadikan penuntun bagi para pelaku *fair trade* dalam memperkuat paradigma perdagangan alternatif ini. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka hemat penulis serangkaian langkah praktis berikut dapat diterapkan, yaitu:

Pertama, menanamkan nilai-nilai *fair trade* ke dalam lokus terkecil masyarakat, yakni keluarga. Kariawan di sebuah perusahaan berbasis *fair trade*, misalnya, bisa diminta untuk dapat memulai praktik ini di tingkat keluarganya masing-masing. Sebagai basis masyarakat, keluarga merupakan tempat terpenting untuk membentuk pandangan *fair trade* yang mapan di dalam masyarakat. Hal-hal yang kerap dianggap sepele

seperti memilah-milah sampah organik dan non organik, membuat kerajinan kreatif menggunakan barang-barang tidak terpakai, penghormatan terhadap sesama dan lingkungan menjadi nilai-nilai dasar yang seharusnya sedini mungkin ditanamkan di tingkat keluarga.

Kedua, memasukan *fair trade* ke dalam kurikulum sekolah. Tempat lain yang cukup strategis untuk memulai membangun paradigma *fair trade* yang kuat di dalam masyarakat adalah pendidikan. Bila sejak dini anak-anak dikenalkan dengan kreativitas dan keramahan terhadap lingkungan dan sesama tentu mereka kelak akan memiliki kecintaan dan kepedulian terhadap alam sekitar. Bila mereka diajari bagaimana memperlakukan secara adil dan bijak terhadap teman-teman mereka tanpa membedakan status *gender*, ekonomi, agama maupu etnis maka mereka akan menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi penghormatan kepada sesama manusia. Pendidikan *fair trade* di sekolah idealnya tidak membatasi diri hanya pada transfer pengetahuan, di mana siswa hanya berkewajiban menghafal materi *fair trade* sebagai bekal mengerjakan soal ujian semata, namun juga harus dengan keteladanan sang guru melalui aneka kegiatan yang bersifat psikomotorik.

Ketiga, gerakan *fair trade* juga harus menyentuh birokrasi pemerintah. Ini tentu bukan perkara mudah, namun kesadaran pemerintah terhadap *fair trade* menjadi jalan kunci kesuksesan gerakan *fair trade*. Presentasi dan brosur sebagai metode promosi harus ditingkatkan dengan aneka program yang sifatnya melibatkan semua jajaran birokrasi di pemerintahan. Kebijakan yang berbasis keadilan harus dimulai dari kesadaran tiap individu di dalam birokrasi pemerintah.

Keempat, harus diakui ada perusahaan yang telah mengamalkan ajaran *fair trade* namun tidak secara formal memakai label *fair trade* bahkan tidak pula masuk ke dalam keanggotaan organisasi *fair trade* tertentu. Orang-orang seperti

ini tentu sangat kita hargai, namun keikutsertaan mereka dalam organisasi *fair trade* akan memperkuat nilai tawar gerakan *fair trade*. *Point* ini harus mendapat perhatian khusus mengingat gerakan *fair trade* yang kuat akan memiliki kemampuan untuk menuntun dan mendorong kebijakan pemerintah. Saat hal tersebut dapat dilakukan maka jalan menuju *fair trade* akan terbuka. Basis kekuasaan bagaimanapun menjadi pondasi penting bagi gerakan *fair trade* di masa depan.

Keempat strategi ini hemat penulis dapat menguatkan gerakan *fair trade*. Bila keluarga, sekolah, pemerintah dan kelembagaan *fair trade* yang kuat telah bersinergi maka akan tercipta masyarakat yang memiliki paradigma *fair trade* yang kokoh. Stagnasi gerakan *fair trade* hemat penulis terletak pada lemahnya sosialisasi tidak hanya konsep namun yang lebih penting adalah praktik *fair trade*. Penulis yakin *fair trade* dengan sendirinya menjadi arus utama dalam perdagangan, bila basis kekuasaan dan agen-agen *fair trade* mengalami penguatan.

Penutup

Paradigma *fair trade* sebagaimana paradigma perdagangan yang lain, berjuang menjadi paradigma dominan. Kesulitan paling besar yang dihadapi *fair trade* dalam perjuangannya yang masih panjang menuju paradigma dominan perdagangan global, hemat penulis, diantaranya: *pertama* absennya basis kekuasaan yang berimplikasi pada *kedua* lemahnya propaganda penguatan *fair trade*. Bila inti masalahnya adalah dua hal tersebut, maka hemat penulis untuk mengokohkan paradigma perdagangan berbasis keadilan ini, langkah yang seharusnya dilakukan adalah memperkuat basis kekuasaan dan propaganda.

Referensi

- Amir, Panzuri (2011). *Fair Trade Sebagai Alternatif Norma Perdagangan Internasional: Pengalaman APIKRI*, (materi presentasi dalam fieldwork S2 HI UGM angkatan 16) Selasa, 14 Juni 2011 di kantor APIKRI, Jl. Imogiri Barat Km.4,5 No.163.
- Burchill, Schoott, *at all* (2005). *Theories of International Relations* (third editions), New York: Pragave Macmillan.
- Buletin APIKRI. No: 1, tahun I. (2011).
- Hazleton (Ed). 2005. *an Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith* (Electronic Classics Series). Pennsylvania: the Pennsylvania State University.
- Hadiwinata, B. S. (2004). *Fair Trade: Gerakan Perdagangan Alternatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Oxfam dan Universitas Katlik Pahrayangan.
- maketradeandfair.org: "*fair Trade and You*" dalam Hadiwinata, *Fair Trade: Gerakan Perdagangan Alternatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Oxfam dan Universitas Katlik Pahrayangan.
- Paradigm - On Definition, Criticism Of Kuhn's Paradigms, Revolutions, Leaps Of Faith, Criticism Of Kuhn's Relativism. Diakses dari: <http://science.jrank.org/pages/7948/Paradigm.html> Senin 11 Juli 2011.
- Permadi, Dedy. "Pergeseran Neo Liberalism eke Neo Keynesianisme: mungkinkah?" *Multiversa*, volume 01, nomor 01, Mei, 2010.
- Bill and Melinda Gates Foundations. *Savings Statistics*. Diakses dari: <http://www.gatesfoundation.org/financialservicesforthepeople/Pages/savings-statistics.aspx>, Rabu 13 Juli 2011.

BAB 9

JALAN BERLIKU PERDAGANGAN INDONESIA-CINA

Isu ekonomi

Dalam Forum Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik di Singapura, November 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Cina Hu Jianto sepakat meperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina. Keduanya menyebut 2010 sebagai tahun persahabatan Indonesia-Cina (Tempo, 26 April-2 Mei 2010, hal 69). Bagi Indonesia menjalin hubungan dengan Cina yang sedang mengalami perkembangan ekonomi luar biasa merupakan pekerjaan yang bukan tanpa manfaat, namun demikian sejumlah pertanyaan patut diajukan: sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menyambut peluang dari Cina?, apa dan dari mana sajakah aneka kemungkinan hambatan muncul? Serta bagaimana seyogyanya merespon Cina?. Tulisan ini bermaksud menyuguhkan sejumlah analisis.

Berdasarkan data IMF tahun 2008, 10 negara dengan perekonomian terbesar adalah AS, Jepang, China, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Rusia, Spanyol dan Brasil. Bahkan secara lebih radikal Konsultan bisnis terkemuka dunia, Price Waterhouse Coopers (PWC) memproyeksikan 10 besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030 adalah China, dan diikuti secara berturut-turut oleh AS, India, Jepang, Brasil, Rusia, Jerman, Meksiko, Prancis dan Inggris (suaramerdeka.com, 22/1/2010). Kini adalah era kebangkitan Cina, menjalin hubungan baik sembari berguru pada Cina nampaknya menjadi alternatif kebijakan rasional yang akan dipilih bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pola hubungan internasional, terutama paska perang dingin (1989) memiliki sedikitnya dua ciri unik yang membedakannya dengan era perang dingin, *pertama* berbeda dengan masa perang dingin yang para pelakunya didominasi oleh Negara, maka di era paska perang dingin muncul beragam

pelaku yang turut meramaikan kancah internasional di samping Negara. Aktor-aktor bukan Negara (*Non state actor*) seperti kelompok kepentingan, perusahaan-perusahaan transnasional maupun individu melakukan aktifitas di dalam dan melintasi batas negara (*transnasional*).

Kedua, pada ranah isu, era sebelum perang dingin didominasi oleh isu keamanan, kekuatan suatu negara (*state power*) dimaknai sebagai kemampuan militer, kepentingan nasional (*national interest*) dipahami hanya dari sisi keamanan negara (*state security*), sembari mengabaikan keamanan manusia (*Human Security*), lingkungan, energi, pangan, ekonomi, kesehatan, terorisme serta aneka isu lainnya yang menjadi tren di era paska perang dingin.

Dalam konteks ini, maka dapat dipetakan sedikitnya terdapat dua sumber potensi masalah—atau bahkan masalah—dalam hubungan Indonesia-Cina, *pertama* masalah atau potensi masalah yang berasal dari tingkat negara (*state*), dalam hal ini bisa berasal dari pemerintah Indonesia maupun Cina, dan *kedua* berasal dari para pelaku ekonomi privat (*non-state actors*) baik domestik maupun para pemain yang berasal dari Cina.

Masalah pada tingkat negara

Pada tingkat negara, sedikitnya ada dua potensi kesulitan yang menghadang Indonesia dalam menjalin kemitraan dengan negeri tirai bambu, *pertama*, hingga tulisan ini dibuat, Indonesia belum memiliki Konsulat Jenderal di Shanghai. Padahal Shanghai kini menjelma menjadi salah satu pusat keuangan dunia (*Tempo, Ibid, hal 70*). Ini tentu memperhatikan pada saat Indonesia berkomitmen mempererat hubungan dengan Cina, Pemerintah justru kurang memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan bagi para pelaku ekonomi untuk dapat berkompetisi secara lebihimbang. Hal ini mengindikasikan betapa Pemerintah RI kurang—bila enggan mengatakan tidak—memiliki basis analisis yang kuat untuk memetakan potensi ekonomi Cina.

Lemahnya informasi tentang aneka kekuatan perekonomian di Cina dan lambannya membuat pemetaan akan berimplikasi pada kegagalan membuat *road map* dalam mensiasati perdagangan dengan Cina, yang akan diakhiri dengan kekalahan dalam perang dagang.

Kedua, gara-gara tumpang tindih birokrasi, ratusan nota kesepahaman Indonesia-Cina yang sudah diteken jalan ditempat. Diantaranya proyek rel kereta api sepanjang 300 kilometer di Kalimantan Tengah senilai US\$ 1 miliar dan pembangunan pabrik baja di Batulicin, Kalimantan Selatan. Bila situasi ini berlanjut bukan mustahil Cina meninggalkan Indonesia. Birokrasi yang rumit bisa menjadikan Indonesia kehilangan kesempatan (Tempo, *Ibid*).

Jamak diketahui birokrasi di Indonesia menjadi momok tersendiri bagi para pelaku bisnis. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya birokrasi di negeri ini, di samping birokrasi yang panjang, rumit dan berbelit. Nampaknya pemerintah harus memangkas birokrasi menjadi lebih ramping sehingga menjadi lebih efektif dan efisien selain juga menciptakan sistem pengawasan yang ketat untuk menghindari aneka praktek KKN.

Level pelaku ekonomi

Sulit dipungkiri, selalu terdapat celah kurang sedap pada setiap sesuatu yang diyakini sempurna, tak terkecuali Cina. Terdapat aneka barang-barang dengan penampilan menarik seperti ponsel, televisi, setrika, aneka perkakas rumah tangga, kendaraan bermotor dan masih banyak lainnya dengan satu ciri yang sama, yaitu: murah. Hal ini tentu nampak sangat menggiurkan konsumen, namun sudah menjadi rahasia umum, aneka barang-barang memikat tersebut adalah barang-barang aspal, alias asli tapi palsu.

Sebut saja misalnya Haff Comm, sebuah perusahaan Cina pembuat Blockberry, dengan mengganti huruf "a" pada kata

Blackberry, ponsel yang mirip Blackberry nampak sekilas seperti kembarannya, yang menarik lagi dan membuat konsumen tergiur gila adalah harganya yang berkisar sepertiga dari harga Blackberry.

Di Shenzhen, kota industri di Provinsi Guangdong, Cina, ada ribuan perusahaan seperti Haff Comm yang membuat ribuan merk ponsel aspal. Sebagian besar perusahaan ini kelas industri rumah tangga dengan jumlah karyawan hanya belasan orang (Tempo, *Ibid*, hal 78). Membanjirnya perusahaan-perusahaan sejenis tentu akan sangat menyulitkan para pelaku ekonomi di tingkat domestik Indonesia. Tanpa produk-produk aspal asal Cina saja aneka produk lokal sudah sangat kuwalahan dengan membanjirnya barang-barang Cina, terlebih lagi dengan keberadaan produk-produk aspal Cina, bukankah tambah meremukkan pasar domestik kita?

Menghadang arus Cina

Baru sekitar 10 tahun Nusantara memberlakukan otonomi daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otoritas yang lebih besar dari pada sebelumnya untuk mengelola daerahnya sendiri. Sementara sebelumnya dalam tahun-tahun yang jauh lebih panjang daerah ditata, diklola dan desain dengan pola sentralisasi. Barangkali inilah yang membuat daerah menjadi gagap dan kurang luwes dalam mengelola daerahnya secara mandiri.

Hemat saya, dalam konteks merespon pasar bebas Asean-Cina maka ada sedikitnya 3 strategi yang bisa dilakukan: *pertama*, secara bertahap Pemerintah harus mengubah pola lama diplomasi yang tersentralisasi. Sudah menjadi kelaziman yang rasanya sulit diubah, bahwa hubungan, diplomasi dan negosiasi antar bangsa diperankan secara mutlak oleh Pemerintah Pusat, kini saatnya konsep diplomasi ditransformasikan kedalam strategi diplomasi total (*total diplomacy*), dimana semua lini dari elemen bangsa ini memiliki

tanggung jawab membawa citra bangsanya dalam berhubungan dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia harus belajar menjadi bangsa besar yang dengan cerdas dan pandai mencitrakan diri di mata bangsa lain.

Kedua, mentransformasikan nasionalisme ke dalam dimensi ekonomi, konon ceritanya orang Jepang, ketika mereka berada di luar negeri, mereka sebisa mungkin tetap akan menggunakan produk dan jasa bangsanya sendiri. Dalam memilih hotel, membeli aneka barang-barang, serta kebutuhan konsumtif lain, produk Jepang akan dipilih. Ini berbeda dengan kebanyakan orang Indonesia yang jangankan bila berada di luar negeri, berada di tanah air saja masih ingin dan bangga menggunakan produk asing.

Ketiga, belajar menjadi bangsa pembelajar. Cina, Jepang dan Malaysia mungkin contoh negara-negara Asia yang pandai meniru. Cina terkenal dengan produk tiruannya dan siapa yang menyangkal kemampuannya dalam meniru aneka produk-produk terkenal. Di awal kebangkitannya setelah dibom sekutu, Jepang dengan sangat beringas dan ambisius mengirimkan para pemudanya ke Amerika dan Eropa, dan kini Jepang menjadi kekuatan ekonomi dunia. Permisalan lain yang dekat adalah Malaysia yang memiliki kebiasaan serba meniru Indonesia, dari mulai lirik lagu kebangsaan, hingga aneka kebudayaan karena ingin menjadi bangsa besar.

Rasanya tiga resep tersebut akan membawa perubahan radikal kemampuan berkompetisi bangsa ini dalam berhadapan dengan Cina, total diplomasi, nasionalisme ekonomi dan menjadi bangsa pembelajar.

GLOSARIUM

Analisa kritis: pandangan yang dikemukakan pihak-pihak yang berada di luar lingkaran kekuasaan terkait dengan kebijakan pembangunan penguasa.

Capital grand: hadiah berupa bantuan keuangan yang diberikan oleh negara kuat kepada negara lemah karena kepatuhannya terhadap keinginan negara kuat.

Close regionalism: kesepakatan ekonomi sejumlah negara yang berupa menghilangkan hambatan dagang di antara sesama anggota dan kesepakatan menciptakan hambatan-hambatan dagang yang sangat rapat bagi negara-negara yang bukan anggota.

Demokrasi: sistem politik yang memposisikan warga negara sebagai pihak yang paling berkuasa melalui mekanisme *trias political*.

Dependensi: ketergantungan suatu negara kepada negara lain yang disebabkan faktor ekonomi maupun keamanan.

Dilema keamanan (Dilemma security): suatu situasi di mana ketika suatu negara meningkatkan keamanannya, maka dimaknai oleh negara lain sebagai ancaman, sehingga direspon dengan meningkatkan keamanan tandingan.

Eco-labeling: label yang dikeluarkan oleh suatu lembaga *free trade* tertentu yang biasanya berupa setiker yang ditempel pada suatu produk tertentu yang memenuhi kriteria *free trade*.

Ekonomi Politik Internasional (EPI)/ Ekonomi Politik Global (EPG): ilmu yang mempelajari tentang kait terkait antara ekonomi dan politik, pasar dan negara, masyarakat dan pemerintah, domestik dan internasional.

Embargo: sanksi ekonomi yang diberikan kepada suatu negara karena dianggap melanggar konvensi internasional.

Emerging market: pasar yang baru muncul, India dan Cina disebut emerging market karena mereka menjadi pasar yang baru muncul setelah sebelumnya merupakan negara miskin.

Ekonomi global: aktivitas ekonomi (produksi, distribusi dan konsultasi) yang berlangsung di tingkat global.

Fair trade: perdagangan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kadilan. *Fair trade* muncul sebagai tandingan *free trade* (**perdagangan bebas**) yang dianggap kerap kali menciptakan ketidakadilan.

Financial power: kekuatan ekonomi yang dimiliki suatu negara. Hanya negara yang memiliki *financial power* tinggi yang dapat mengembargo negara lain.

Flu burung: firus H 1 N 5 yang berasal dari unggas dan dapat menular ke manusia, firus ini menjadi isu global dan diantisipasi oleh negara-negara di dunia melalui kontrol terhadap pengunjung asing.

Free trade: perdagangan bebas yang ditandai dengan tidak adanya intervensi negara terhadap aktivitas ekonomi.

Gender: gerakan yang memperjuangkan persamaan status perempuan dengan laki-laki.

Gross Domestic Product (GDP): total produksi yang dilakukan di dalam suatu negara sebagai tolak ukur tingkat perekonomian negara tersebut. GDP merupakan tolak ukur ekonomi yang berbasis paham liberal.

Gross National Product (GNP): total produksi yang dilakukan oleh semua warga negara tertentu baik yang dilakukan di negara asalnya maupun di negara lain, sebagai tolak ukur tingkat perekonomian. GNP merupakan tolak ukur ekonomi yang berbasis paham merkantilis.

Hak Asasi Manusia (HAM): hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, seperti hak hidup, hak berkeyakinan, hak ekonomi, hak diperlakukan sama, hak memiliki dan lain-lain.

Hubungan Internasional (HI): ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas hubungan antar negara, maupun aktor-aktor non negara yang beraktivitas lintas batas negara.

Ideologi: pandangan hidup terhadap dunia yang mempengaruhi perilaku manusia baik secara individu maupun kolektif.

Integrasi: proses penyatuan unit-unit monolit yang sebelumnya terpisah satu sama lain menjadi satu yang padu.

Independen: kemandirian, ketidaktergantungan pada yang lain, kemerdekaan dari intervensi.

Interdependensi kompleks (*Complex Interdependence*): kesalingtergantungan di antara banyak pihak dalam banyak hal.

***Inter-regional relations* (hubungan antar regional):** hubungan yang terjadi di antara organisasi-organisasi regional.

Investasi: modal yang dikembangkan guna diambil manfaatnya di masa depan.

Investor: orang yang melakukan investasi.

Junta: pemerintahan militer yang otoriter.

Keamanan nasional (*national security*): keamanan yang pertimbangan-pertimbangannya adalah kepentingan nasional.

Kemanan manusia (*human security*): keamanan yang pertimbangan-pertimbangannya adalah kepentingan manusia.

Keseimbangan kekuatan (*balance of power*): situasi tidak ada perang antar negara yang muncul sebagai akibat dari keberadaan kekuatan-kekuatan yang seimbang dan bertentangan.

Kelas sosial: kelas yang terbentuk dalam masyarakat oleh faktor-faktor ekonomi.

Kelompok kepentingan: kelompok yang dalam aktivitas gerakannya mengusung kepentingan-kepentingan tertentu di masyarakat.

Komunisme: paham yang memperjuangkan adanya kepemilikan bersama dan segala sesuatunya di antur oleh pemerintah yang otoriter.

Liberalisme: paham yang memperjuangkan kepemilikan individu dan pasar bebas. Posisi negara menurut paham ini hanya sebagai penjamin keamanan berlangsungnya aktivitas ekonomi.

Makhluk ekonomi: makhluk yang berorientasi ekonomi.

Makhluk politik: makhluk yang berorientasi politik.

Marshal plan: bantuan pembangunan dari Amerika untuk negara-negara Eropa paska perang dunia II.

Merkantilisme: paham yang memperjuangkan kedaulatan perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan proteksi dalam perdagangan.

Multiple issues: isu yang majemuk, berjalin berkelindan dan melibatkan banyak dan beragam aktor.

Multilateralisme: hubungan perdagangan yang dilakukan di bawah rezim pasar bebas.

Most-favored-nation (MFN): prinsip perlakuan yang sama terhadap satu negara dengan negara lainnya atau tidak pilih kasih dalam kebijakan perdagangan.

Negara: wilayah yang memiliki penduduk, memiliki penguasa yang terlegitimasi dan diakui sebagai negara oleh negara lain.

Open regionalism: kerjasama regional yang—karena berbagai alasan—dalam perkembangannya membuka diri terhadap perdagangan dengan pihak di luar anggota.

Otoriter: pemerintahan anti demokrasi yang biasanya ditandai salah satunya dengan kebijakan represif.

Panas global (*global warming*): peningkatan panas di permukaan bumi yang disebabkan oleh menipisnya atmosfer yang disebabkan oleh gas-gas tertentu yang dihasilkan dari aktivitas produksi.

Perdagangan internasional: perdagangan yang bersifat lintas batas negara.

People power: gerakan massa yang didorong oleh semangat demokrasi.

Perspektif: corak pandang (terhadap suatu masalah) yang mempengaruhi pemahaman dan perilaku terhadap masalah tersebut.

Perusahaan Multi Nasional (PMN): perusahaan yang beroperasi di beberapa negara.

Preferensi: pilihan kebijakan yang diperjuangkan aktor tertentu.

Pembangunan: proses mendorong pertumbuhan (dan pemerataan ekonomi).

Politik global: perjuangan mempertahankan dan memperluas kekuasaan yang terjadi di tingkat dan dalam skala dunia.

Political will: kemauan politik penguasa terhadap preferensi kebijakan tertentu.

Positive sum game: permainan di mana suatu kemenangan yang didapatkan pihak tertentu tidak berarti kekalahan pada pihak lain atau dengan kata lain semua pihak bisa menang.

Problem solving: teori yang berorientasi pada jalan keluar.

Protokol kyoto: kesepakatan di antara berbagai negara untuk untuk mengurangi gas emisi guna mengurangi panas global yang dilakukan di Kyoto, Jepang.

Propaganda: upaya meyakinkan orang lain terhadap paham tertentu untuk mempengaruhi perilaku mereka melalui berbagai upaya.

Politik: perjuangan mempertahankan dan memperluas kekuasaan.

Reformisme: paham yang mengaggap perekonomian dijalankan oleh aktor yang majemuk, bersifat konfliktual, kerjasama, harmoni dan eksploitatif namun dapat diperbaiki dengan berbagai agenda yang melibatkan negara dan aktor-aktor non negara lainnya.

Regionalisme: kerjasama yang terjadi di antara negara-negara dalam suatu regional (kawasan) baik dalam ekonomi, politik maupun keamanan.

Regional Trade Agreement (RTA): kesepakatan perdagangan di antara negara-negara dalam satu region.

Rewards: ganjaran yang diberikan oleh negara kuat kepada negara lemah yang dianggap patuh pada kemauan negara kuat.

Rezim: regulasi, tatanan yang mengacu pada kepentingan penguasa.

Spillover: perluasan kerjasama yang sebelumnya hanya merupakan satu jenis kerjasama kemudian melimpah ke jenis-jenis kerjasama lainnya.

Strukturalisme/ radikaisme: paham yang menganggap bahwa kemiskinan sejatinya merupakan produk dari struktur kekuasaan dan ekonomi.

Super power: negara yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, budaya yang sangat kuat sehingga menjadi kekuatan global yang tidak tertandingi.

Tarif: pajak yang ditarik oleh pemerintah dari produk asing dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri.

Terorisme: paham yang berupaya menciptakan keresahan warga negara melalui berbagai aksi teror dengan tujuan meruntuhkan legitimasi pemerintah.

Trans regional relations: berbagai hubungan yang terjadi di antara aktor-aktor non pemerintah yang bersifat lintas batas negara.

Zero sum game: permainan yang bila satu pihak menang pasti pihak lain kalah.

LAMPIRAN

Tabel 4. 1: Realisasi Investasi

PMA	Proyek	Nilai (US\$.Juta)	PMDN	Proyek	Nilai (Rp. Milyar)
2005	909	8.914,60	2005	214	30.665,00
2006	867	5.796,90	2006	164	20.788,40
2007	983	10.341,10	2007	159	34.878,70
2008	1.138	14.871,40	2008	239	20.363,40
2009	176	1.970,90	2009	29	2.628,30

Sumber: <http://www.indonesia.go.id/>

Tabel 4. 2:
Arus Investasi dari dan menuju Indonesia (2004-2007)

Tahun	Investasi keluar dari Indonesia	Investasi Masuk ke Indonesia	PMA Netto Ke Indonesia
2004	-3,408	1,896	-1,512
2005	-3,065	8,336	5,271
2006	-2,703	4,914	2,211
2007	-4,790	6,928	2,139

Sumber: <http://armyalghifari.wordpress.com/2010/07/06/sadar-kita-bukan-kuli>, diakses Senin 27 Juni 2011, pukul 17:05 WIB.

Tabel 4. 3:
Nilai Neto Arus PMA ke Indonesia, 1990-2004 (juta dollar AS)

Tahun	Nilai
1990	1.093
1991	1.482
1992	1.777
1993	2.004
1994	2.109
1995	4.346
1996	6.194
1997	4.667
1998	- 356
1999	-2.745
2000	-4.550
2001	-2.978
2002	145
2003	-597
2004	423

Sumber: Bank Indonesia: *Indonesian Financial Statistics*, beberapa terbitan berturut- Turut sampai Februari 2005 dalam Tambunan, Tulus (2006).

Tabel 4. 4
Pilihan Kebijakan:
Siapa yang diuntungkan dan dirugikan?

Membuka investasi asing		Menutup investasi asing		Campuran berbasis prioritas kepentingan ekonomi nasional	
Untung	Rugi	Untung	Rugi	Untung	Rugi
Investor asing	Investor dalam negeri	Investor dalam negeri	Investor asing	Investor dalam negeri	Investor asing
Konsumen		Konsumen (tergantung derajat persaingan, jika tinggi akan diuntungkan jika lemah akan dirugikan)		Konsumen	
Pemerintah (tergantung pertumbuhan ekonomi)		Pemerintah (tergantung pertumbuhan ekonomi)		Pemerintah (tergantung pertumbuhan ekonomi)	

Tabel 6. 1.
Perluasan anggota regionalisme Eropa dari tahun 1952-2007

No	Negara	Tahun bergabung	No	Negara	Tahun bergabung
1	Jerman	1952	15	Finlandia	1995
2	Perancis	1952	16	Estonia	2004
3	Italia	1952	17	Latvia	2004
4	Belgia	1952	18	Lituania	2004
5	Belanda	1952	19	Polandia	2004
6	Luksemburg	1952	20	Malta	2004
7	Denmark	1973	21	Slovenia	2004
8	Irlandia	1973	22	Republik Ceko	2004
9	Britania Raya	1973	23	Slowakia	2004
10	Yunani	1981	24	Hongaria	2004
11	Portugal	1986	25	Siprus selatan	2004
12	Spanyol	1986	26	Bulgaria	2007
13	Swedia	1995	27	Rumania	2007
14	Austria	1995			

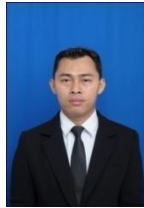
Tabel. 6. 2.
Daftar traktat-traktat regionalisme Eropa (1952-2000)

No	Traktat	Tahun
1	The Treaty of Paris (ECSC)	1952
2	The Treaty of Rome (Euratom dan EEC)	1957
3	Schengen Agreement	1985
4	Single Act., Brussels	1987
5	The Treaty of Maastrich (EU)	1992
6	The Treaty of Amsterdam	1997
7	The Treaty of Nice	2000

Tabel 8. 1
Ringkasan Indikator Transformasi Paradigma

No	Indikator transformasi paradigma	Kemungkinan fair trade
1	<i>Momentum</i>	Krisis: 1930, 1970, 1997, 2008
2	<i>problem solving capability</i>	<i>Fair trade</i> memberikan problem solving kongkrit, lihat kasus APIKRI di Yogyakarta
3	Promoting agent	Lemah lihat saja misalnya di Indonesia hanya ada 20 pelaku fair trade
4	<i>Power base</i>	Lemah , pemerintah umumnya tidak hirau terhadap unsur <i>fairnes</i> dalam perdagangan

BIODATA PENULIS



Sugiarto Pramono lahir di Tegal 2 Pebruari 1983, setelah menamatkan Madrasah Aliah Futuhiyyah 1 Mranggen Demak pada tahun 2001, Penulis melanjutkan studinya di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) dan selesai pada 2005. Kemudian melanjutkan studi S2 di FISIP UGM pada Jurusan yang sama di tahun 2010 dan lulus pada tahun 2012. Sekarang penulis aktif mengajar di FISIP UNWAHAS, aktif menulis buku-buku tentang Hubungan Internasional, dan menjadi tutor pada pendidikan politik pemula. Dapat dihubungi melalui hp: 087 861 287 670 atau email: sugiartop@gmail.com, tulisan yang telah dipublikasikan:

No	Judul	Media	Tanggal
1	Pergeseran Politik Luar Negeri India terhadap Myanmar [buku ber ISBN]	Wahid Hasyim University Press	Februari 2013
2	Memahami potensi lokal, bersaing di pasar global [buku ber ISBN]	Wahid Hasyim University Press	Maret 2013
3	“Membaca” HI: dari perang antar negara hingga pembagunan lokal	Wahid Hasyim University Press	Maret 2013
4	Perjuangan menuju Fair trade: pengalaman APIKRI dalam memediasi pengrajin lokal dan	SPEKTRUM, Vol 12, No 2, Juli 2012	1 Juli 2012

	D'Best Furniture dalam mensiasati eco labeling		
5	Meneropong masa depan komunitas ASEAN 2012	SPEKTRUM, Vol 7, No 1, Januari 2010	Januari 2010
6	Faktor pendorong melakukan kerjasama <i>sister province</i> Jawa Tengah-Queensland [Australia] 1991-2009	EKSPLANASI, Vol 4, No 8, Oktober 2009	Oktober 2009
7	Peran Pemkot dan masyarakat sipil dalam <i>up grading</i> kota tua: studi perbandingan Batavia lama dan Ciutat Vella	Website Institute of International Studies: iis-ugm.org	5 Juli 2011

ISU-ISU PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Buku di tangan pembaca ini merupakan pikiran-pikiran “liar”, tentang isu-isu dalam perdagangan internasional, yang enggan patuh pada standar nilai-nilai 3 tradisi arus utama dalam studi Ekonomi Politik Global/ EPG (merkantilisme, liberalisme dan strukturalisme) dan mengkontruksi nilainya sendiri yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh unsur keadilan dalam praktik perdagangan internasional. Berisi 8 tulisan yang terbagi dalam 3 tema (isu embargo, isu regionalisme dan isu *fair trade*), cukup beragam dari segi kasus dan pendekatan kendati masih berada dalam “satu keranjang” studi EPG.

Sebagian besar gagasan dari tulisan-tulisan tersebut lahir di dalam ruang kelas kuliah Perdagangan Internasional secara persial, terpisah dan tidak dimaksudkan untuk dirangkai menjadi sebuah kesatuan yang utuh sebagai sebuah buku, namun ide untuk menyatukannya dalam sebuah susunan yang lebih sistematis muncul ketika kami—saya dan mahasiswa—merasakan perlunya contoh-contoh kasus spesifik sebagai pelengkap materi kuliah. Isi buku ini, hemat penulis—sebagai pengampu mata kuliah Perdagangan Internasional—sangat membantu dalam proses belajar mahasiswa, sehingga menerbitkannya akan sangat bermanfaat.

Selebihnya silahkan pembaca menikmati suguhan gagasan-gagasan segar dalam buku ini. Ibarat sebuah album yang terdiri dari beberapa lagu maka pembaca bisa mulai mendengarkannya urut dari depan ke belakang atau langsung melompat ketengah atau bahkan memulali dari belakang menuju ke depan. Selamat membaca.



Wahid Hasyim University Press

ISBN: 978-602-8273-45-9